



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut RPD adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas provinsi, kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.

4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
6. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
7. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.
8. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah unit/fasilitas yang menjalankan sistem manajemen mutu dan/atau telah terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dalam rangka pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, sertifikasi veteriner, dan memastikan kesehatan hewan serta keamanan pangan asal hewan.
9. Pengujian Penyakit Hewan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengendalikan penyakit pada hewan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi kesehatan masyarakat, terutama untuk penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (*zoonosis*).
10. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat THL-TBPP adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
12. Sekolah Lapang Tematik Pertanian yang selanjutnya disebut SL Tematik adalah kegiatan proses belajar-mengajar dengan partisipasi, aktif, mencari dan menemukan fakta, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri atau Penyuluh Pertanian.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah, kementerian/ lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
16. Dinas adalah perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
17. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
18. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. fasilitasi pelayanan pengujian penyakit hewan dalam rangka peningkatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
- c. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa sub jenis:
  - a. pertanian; dan
  - b. bantuan operasional Penyuluh Pertanian.
- (2) Sub jenis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. operasional pengujian penyakit hewan;
  - b. layanan operasional Puskesmas; dan
  - c. layanan Penyuluh Pertanian.
- (3) Sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biaya operasional Penyuluh Pertanian.

- (4) Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas menyusun RPD melalui aplikasi Sistem Informasi KRISNA.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. menu dan rincian kegiatan;
  - b. lokasi kegiatan;
  - c. target keluaran (output) kegiatan; dan
  - d. kebutuhan dana kegiatan.
- (3) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 1.
- (5) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), RPD disusun dengan tahapan:
  - a. rencana penggunaan dana biaya operasional penyuluh pertanian diusulkan secara tertulis kepada Kementerian Pertanian oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi;
  - b. dinas kabupaten/kota dalam mengusulkan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui dinas provinsi;
  - c. dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan rencana penggunaan dana dari dinas kabupaten/kota dan usulan rencana penggunaan dana dari dinas provinsi;
  - d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui Badan PPSDMP;
  - e. Badan PPSDMP melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi data penetapan rencana penggunaan dana yang disampaikan provinsi; dan
  - f. data penetapan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud huruf e disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

- (6) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan melampirkan:
  - a. untuk operasional pengujian penyakit hewan:
    1. penetapan petugas penanggung jawab pada Laboratorium Kesehatan Hewan, sesuai dengan format 2;
    2. penetapan petugas penguji penyakit hewan pada Laboratorium Kesehatan Hewan, sesuai dengan format 3; dan
    3. data pelaporan dan data pengujian penyakit hewan, sesuai dengan format 4.
  - b. untuk layanan operasional Puskesmas:
    1. penetapan petugas Puskesmas lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 5;
    2. penetapan petugas pelapor iSIKHNAS lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 6; dan
    3. data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan sesuai dengan format 7.
  - c. untuk layanan penyuluh pertanian:
    1. penetapan CPCL penerima layanan operasional BPP, sesuai dengan format 8;
    2. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik, sesuai dengan format 9; dan
    3. penetapan CPCL kegiatan magang usaha tani bagi petani di P4S, sesuai dengan format 10.
- (7) Rencana penggunaan dana untuk kegiatan biaya operasional penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai dengan melampirkan penetapan Penyuluh Pertanian penerima biaya operasional Penyuluh Pertanian sesuai format 11.
- (8) Format 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 4, format 2 sampai dengan format 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, format 5 sampai dengan format 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, format 8 sampai dengan format 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, dan format 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Dinas dapat mengusulkan perubahan atas RPD yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan perubahan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai dengan kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau

- b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Usulan perubahan atas RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Usulan perubahan atas RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas melalui:
  - a. aplikasi Sistem Informasi KRISNA untuk sub jenis pertanian; dan
  - b. surat usulan perubahan untuk sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian, setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan penetapan persetujuan Kementerian Pertanian melalui:
  - a. aplikasi Sistem Informasi KRISNA pada sub jenis pertanian; dan
  - b. surat penetapan perubahan pada sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1  
Komponen Kegiatan

Pasal 6

Operasional Pengujian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. proses akreditasi;
- b. bahan pengujian dan bahan habis pakai;
- c. operasional laboratorium; dan
- d. surveilans tindak lanjut kasus.

Pasal 7

Layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. obat hewan;
- b. bahan pendukung pengobatan;
- c. operasional pelaporan iSIKHNAS;
- d. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- e. koordinasi;
- f. surveilans;
- g. pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel ke laboratorium; dan
- h. bimbingan teknis/pelatihan terkait kesehatan hewan.

### Pasal 8

Layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. layanan operasional BPP terdiri atas:
  1. pengumpulan dan pengelolaan data informasi;
  2. koordinasi dan penyusunan rencana kerja;
  3. supervisi gerakan pembangunan pertanian;
  4. klinik konsultasi agribisnis; dan
  5. temu usaha;
- b. SL Tematik terdiri atas:
  1. sosialisasi;
  2. rebug tani;
  3. kursus tani;
  4. *farm field day* (FFD); dan
  5. pengawalan dan pendampingan; dan
- c. magang usaha tani bagi petani di P4S terdiri atas:
  1. perlengkapan peserta;
  2. konsumsi;
  3. dukungan administrasi; dan
  4. perjalanan peserta.

### Pasal 9

Biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. insentif Penyuluh Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP;
- b. honor THL-TBPP; dan
- c. iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 11

Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas daerah provinsi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - d. dinas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Paragraf 2

#### Penyaluran dan Pengelolaan

#### Pasal 13

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Swakelola.
- (3) Bantuan operasional Penyuluh Pertanian di daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening Penyuluh Pertanian.
- (4) Penyaluran biaya operasional Penyuluh Pertanian dari rekening kas umum daerah ke rekening Penyuluh Pertanian dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
- (5) Penyaluran biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Badan PPSDMP berdasarkan *output* kinerja Penyuluh Pertanian yang dilaporkan secara periodik melalui aplikasi evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian sesuai format 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada dinas pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk diteruskan kepada perangkat pengelola keuangan daerah sebagai dasar penyaluran kepada penyuluh pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## PELAPORAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:
  - a. volume kegiatan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian;
  - b. hasil kegiatan per bulan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian;
  - c. capaian indikator kinerja dari masing-masing kegiatan; dan
  - d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
  - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode berjalan;

- b. pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian; dan
- c. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

#### Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
  - a. minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
  - b. minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
  - c. minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian dan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib disampaikan oleh Dinas melalui aplikasi emonev DAK Nonfisik Kementerian Pertanian yang dapat diakses pada laman <https://emonev.pertanian.go.id> dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen rencana penggunaan dana/revisi rencana penggunaan dana yang telah diinput dan disetujui dalam aplikasi Sistem Informasi KRISNA.
- (3) Khusus kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian mengacu pada rekapitulasi dan rekonsiliasi penetapan rencana penggunaan biaya operasional Penyuluh Pertanian beserta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan PPSDMP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal aplikasi emonev DAK Nonfisik mengalami gangguan, pelaporan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang akan ditentukan dan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran resmi oleh Kementerian Pertanian.

#### Pasal 18

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan verifikasi oleh Badan PPSDMP dan/atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
  - a. sasaran penerima manfaat;
  - b. jumlah dana;
  - c. waktu penyaluran;
  - d. penggunaan dana;
  - e. pertanggungjawaban;
  - f. kebermanfaatan; dan
  - g. dokumen/data dukung yang dilampirkan.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 19

- (1) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan, melakukan pembinaan dalam pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat melibatkan dinas daerah provinsi yang membidangi pertanian.

### Pasal 20

- (1) Gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis kepada pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui dinas yang membidangi pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat berkonsultasi dengan unit kerja eselon 1 terkait di Kementerian Pertanian.

## Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. kelengkapan dokumen laporan;
  - c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (output);
  - e. permasalahan pelaksanaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
  - f. dampak dan manfaat pelaksanaan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari:
  - a. kabupaten/kota;
  - b. provinsi; dan
  - c. pusat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi oleh pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit eselon I terkait.
- (5) Tindak lanjut pemantauan dan evaluasi akan digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada Kementerian Keuangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| Nomor Format | Judul Dokumen  |
|--------------|--|
| Format 1     | Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian                             |
| Format 2     | Penetapan Petugas Penanggungjawab Laboratorium                                     |
| Format 3     | Penetapan Petugas Penguji Laboratorium Kesehatan Hewan                             |
| Format 4     | Data Pelaporan dan Data Pengujian Penyakit Hewan                                   |
| Format 5     | Penetapan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota                     |
| Format 6     | Penetapan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota                          |
| Format 7     | Data Pelaporan Kasus dan Perkembangan Kasus Penyakit Hewan serta Data Pengobatan   |
| Format 8     | Penetapan Balai Penyuluh Pertanian Penerima Kegiatan Layanan Operasional BPP       |
| Format 9     | Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Tematik                       |
| Format 10    | Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Magang Usaha Tani Petani di P4S |
| Format 11    | Penetapan Penyuluh Pertanian Penerima Biaya Operasional Penyuluh Pertanian         |
| Format 12    | Format Laporan Kegiatan Penyuluh Pertanian   |

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

**RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| Uraian Kegiatan<br>(1)   | Penerima/Lokasi Kegiatan<br>(2) | Metode Pengadaan<br>(3) | Rincian Perhitungan |               |                          | Jumlah (Rp)<br>(7) |
|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
|  |                                 |                         | Volume<br>(4)       | Satuan<br>(5) | Harga Satuan (Rp)<br>(6) |                    |
| <b>1. Pertanian</b>  |                                 |                         |                     |               |                          |                    |
| <b>A. Operasional Pengujian Penyakit Hewan</b>                 |                                 |                         |                     |               |                          | <b>150.000.000</b> |
| 1. Proses Akreditasi   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 20.000.000         |
| 2. Bahan Pengujian dan Bahan Habis pakai                       |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 110.000.000        |
| 3. Operasional Laboratorium                                    |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 8.000.000          |
| 4. Surveilans Tindak Lanjut Kasus                              |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 12.000.000         |
| <b>B Operasional Pusat Kesehatan Hewan</b>                     |                                 |                         |                     |               |                          | <b>194.400.000</b> |
| 1 Obat Hewan   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 50.000.000         |
| 2 Bahan Pendukung Pengobatan                                   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 8.500.000          |
| 3 Operasional Pelaporan iSIKHNAS                               |                                 |                         |                     | OB            |                          | 2.400.000          |
| 4 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan                        |                                 |                         |                     | OK            |                          | 102.000.000        |
| 5 Koordinasi   |                                 |                         |                     | OK            |                          | 5.100.000          |
| 6 Surveilans   |                                 |                         |                     | OK            |                          | 3.400.000          |
| 7 Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium |                                 |                         |                     | Tahun         |                          | 3.000.000          |
| 8 Bimtek/Pelatihan terkait Kesehatan Hewan                     |                                 |                         |                     | OP            |                          | 20.000.000         |
| <b>C Layanan Penyuluhan dan Pertanian</b>                      |                                 |                         |                     |               |                          |                    |
| <b>1 Layanan Operasional BPP</b>                               |                                 |                         |                     |               |                          | <b>40.000.000</b>  |
| a Pengumpulan dan pengelolaan data informasi                   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 13.820.000         |
| b Koordinasi dan penyusunan rencana kerja                      |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 4.860.000          |
| c Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian                      |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 6.000.000          |
| d Klinik Konsultasi Agribisnis                                 |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 4.400.000          |
| e Temu Usaha   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 10.920.000         |
| <b>2 Sekolah Lapang Tematik</b>                                |                                 |                         |                     |               |                          | <b>100.000.000</b> |
| a Sosialisasi  |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 15.600.000         |
| b Rembug Tani  |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 15.600.000         |
| c Kursus Tani  |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 48.000.000         |
| d Farm Field Day   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 15.600.000         |
| e Pengawasan dan Pendampingan                                  |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 5.200.000          |
| <b>3 Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S</b>                  |                                 |                         |                     |               |                          | <b>356.715.000</b> |
| a Perlengkapan peserta   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 7.100.000          |
| b Konsumsi (3 bulan)   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 198.000.000        |
| c Dukungan Administrasi  |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 2.215.000          |
| d Perjalanan Peserta   |                                 |                         |                     | Paket         |                          | 149.400.000        |
| <b>2. Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian</b>             |                                 |                         |                     |               |                          |                    |
| <b>A. Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian</b>               |                                 |                         |                     |               |                          | <b>72.966.000</b>  |
| <b>1 Insentif Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TBPP</b>          |                                 |                         |                     |               |                          | <b>16.260.000</b>  |
| a Wilayah barat ( 12 OB x 380.000)                             |                                 |                         |                     | OB            |                          | 4.560.000          |
| b Wilayah Tengah (12 OB x 475.000)                             |                                 |                         |                     | OB            |                          | 5.700.000          |
| c Wilayah Timur (12 OB x 500.000)                              |                                 |                         |                     | OB            |                          | 6.000.000          |
| <b>2 Honorarium THL - TBPP</b>                                 |                                 |                         |                     |               |                          | <b>56.400.000</b>  |
| a SLTA (12 OB x 1.200.000)                                     |                                 |                         |                     | OB            |                          | 14.400.000         |
| b DIII (12 OB x 1.500.000)                                     |                                 |                         |                     | OB            |                          | 18.000.000         |
| c DIV/S1 (12 OB x 2.000.000)                                   |                                 |                         |                     | OB            |                          | 24.000.000         |
| <b>3 Iuran BPJS (12 OB x 25.500)</b>                           |                                 |                         |                     |               |                          | <b>306.000</b>     |

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,  
Kepala ... (PD teknis)

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)  
NIP ...

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Penanggungjawab Laboratorium ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. .... ;  
b. ....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

GUBERNUR...PROVINSI...,

... (*tanda tangan dan - 16 -temple*)

... (*nama*)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. ....
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB  
LABORATORIUM TAHUN 2025

PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

| NO  | PROVINSI | NAMA<br>LABORATORIUM | IDENTITAS PETUGAS |        |     |        |
|-----|----------|----------------------|-------------------|--------|-----|--------|
|     |          |                      | NAMA              | ALAMAT | NIK | NO. HP |
| 1   |          |                      |                   |        |     |        |
| 2   |          |                      |                   |        |     |        |
| ... |          |                      |                   |        |     |        |
| dst |          |                      |                   |        |     |        |

GUBERNUR PROVINSI ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGUJI  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI ...,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas penguji laboratorium kesehatan hewan Provinsi ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan penanggungjawab laboratorium Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Provinsi... Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ... ;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR RPROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGUJI  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI ... TAHUN 2025

PETUGAS PENGUJI LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
TAHUN 2025

| NO  | PROVINSI | NAMA<br>LABORATORIUM | IDENTITAS PETUGAS |        |     |        |
|-----|----------|----------------------|-------------------|--------|-----|--------|
|     |          |                      | NAMA              | ALAMAT | NIK | NO. HP |
| 1   |          |                      |                   |        |     |        |
| 2   |          |                      |                   |        |     |        |
| ... |          |                      |                   |        |     |        |
| dst |          |                      |                   |        |     |        |

GUBERNUR PROVINSI ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...



KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

- Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;
- Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;  
2. melakukan kegiatan pengobatan penyakit hewan menular strategis;  
3. melakukan kegiatan koordinasi;  
4. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner; dan  
5. melakukan kegiatan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... .
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ... ,

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS...  
KABUPATEN...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS  
PELAYANAN KESEHATAN  
HEWAN LINGKUP  
KABUPATEN/KOTA ... TAHUN  
2025

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025

| NO  | PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA | NAMA<br>PUSKESWAN | IDENTITAS PETUGAS PELAYANAN<br>KESEHATAN HEWAN |        |     |        |
|-----|----------|--------------------|-------------------|--|--------|-----|--------|
|     |          |                    |                   | NAMA   | ALAMAT | NIK | NO. HP |
| 1   |          |                    |                   |  |        |     |        |
| 2   |          |                    |                   |  |        |     |        |
| dst |          |                    |                   |  |        |     |        |

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

... (*tanda tangan dan stempel*)  
... (*nama*)  
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
1. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);  
2. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS;  
3. melakukan rekapitulasi data pelayanan kesehatan hewan setiap bulan.  
4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelapor iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Petugas pelapor iSIKHNAS untuk pengelolaan data Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025

PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA ...  
TAHUN 2025

| NO  | PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA | NAMA<br>PUSKESWAN | IDENTITAS PETUGAS PELAPOR<br>iSIKHNAS |        |     |        |
|-----|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----|--------|
|     |          |                    |                   | NAMA                                  | ALAMAT | NIK | NO. HP |
| 1   |          |                    |                   |                                       |        |     |        |
| 2   |          |                    |                   |                                       |        |     |        |
| ... |          |                    |                   |                                       |        |     |        |
| dst |          |                    |                   |                                       |        |     |        |

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PENERIMA BANTUAN  
KEGIATAN LAYANAN OPERASIONAL BPP  
DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA BPP PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN OPERASIONAL BPP DI  
KABUPATEN/KOTA ... PROV ... TAHUN 2025

| No  | Nama BPP | Nama Koordinator/Pimpinan BPP | Jumlah Penyuluh (Orang) | Anggaran (Rp) |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| (1) | (2)      | (3)                           | (4)                     | (5)           |
| 1   |          |                               |                         |               |
| 2   |          |                               |                         |               |
| 3   |          |                               |                         |               |
|     |          |                               |                         |               |

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN KOTA ...

... (*tanda tangan dan stemple*)  
... (*nama*)  
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KABUPATEN/KOTA  
NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK  
MELALUI DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

- Menimbang : c. ...;  
                  d. ...;
- mengingat : 4. ...;  
                  5. ...;  
                  6. ...;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...

Memutuskan

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan lokasi pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian bekerjasama dengan BPP di Lokasi kecamatan pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik mempunyai tugas:  
a. Melakukan Sosialisasi Rembug Tani;  
b. Menyiapkan bahan pembelajaran;  
c. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian melalui Kursus Tani (teori dan praktek);  
d. Melakukan Pengawasan dan Pendampingan secara rutin di Lokasi Sekolah Lapang (Laboratorium Lapangan);  
e. Melakukan Temu Lapang Tani/*Farm Field Day* (FFD); dan  
f. Melakukan pendampingan, pengawasan, pengamatan, pemantauan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Sekolah Lapang Tematik Pertanian.
- KETIGA : Dinas yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pada setiap tahapan kegiatan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pelaksanaan Sekolah Lapang maupun secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.
- KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada kegiatan Sekolah Lapangan Tematik baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis
- KELIMA : Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dalam Diktum KEDUA sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per BPP dalam bentuk sosialisasi, rembug tani, kursus tani, *farm field day*, serta pengawasan pendampingan.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
Pada Tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
Kabupaten/Kota ...

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati/Walikota ...
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ...;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
(CPCL) KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK  
DAK NONFISIK TAHUN 2025

DATA BPP PELAKSANA SL DAK NONFISIK TA 2025

| No   | Nama BPP | Kab/Kota | Status bangunan | Sarana IT | Akses Internet | Listrik | Jumlah Penyuluh | Jumlah WKPP | Jumlah kelompok taniBinaan |
|------|----------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 1    |          |          |                 |           |                |         |                 |             |                            |
| 2    |          |          |                 |           |                |         |                 |             |                            |
| dst. |          |          |                 |           |                |         |                 |             |                            |

DATA PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING SL DAK NONFISIK TA 2025

| No   | Nama Penyuluh | NIK (16 digit) | Status | Jumlah kelompok tani Binaan | Jumlah WKPP |
|------|---------------|----------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 1    |               |                |        |                             |             |
| 2    |               |                |        |                             |             |
| dst. |               |                |        |                             |             |

DATA KELOMPOK TANI PESERTA SL DAK NONFISIK TA 2025

| No   | Kabupaten/ Kota | Nama BPP | Nama kelompok tani | Desa | Total Jumlah Anggota kelompok tani | Komoditas Utama | Total Luas Lahan Anggota kelompok tani |
|------|-----------------|----------|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|--|
| 1    |                 |          |                    |      |                                    |                 |  |
| 2    |                 |          |                    |      |                                    |                 |  |
| dst. |                 |          |                    |      |                                    |                 |  |

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)  
KEGIATAN MAGANG USAHA TANI BAGI PETANI DI PUSAT PELATIHAN  
PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)  
DAK NONFISIK TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;  
                  : b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;  
                  : 2. ... ;  
                  : 3. ... ;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan P4S Pelaksana Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S melalui DAK Nonfisik melibatkan penyuluh pertanian, petani, ketua P4S, instruktur/pelatih P4S, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.
- KETIGA : 1. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator berkonsultasi ke Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian untuk menyiapkan materi permagangan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani dan peserta pelatihan serta melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan tema permagangan serta berkoordinasi dengan Dinas ... Kabupaten/Kota ... terkait penyelenggaraan permagangan;  
2. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator di P4S mendokumentasikan kegiatan permagangan dengan foto *open camera*;  
3. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator di P4S menyusun laporan kegiatan permagangan dan melaporkan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... serta Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian sebagai pembina P4S.
- KEEMPAT : 1. Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis;  
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pendampingan kegiatan Permagangan pada aspek teknis.
- KELIMA : Menyelenggarakan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp356.715.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) per P4S dalam bentuk perlengkapan peserta, bahan praktek, bantuan transportasi dan uang saku, dan/atau konsumsi yang dilaksanakan selama 90 Hari/3 Bulan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
(CPCL) KEGIATAN MAGANG USAHA TANI BAGI  
PETANI DI PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN  
PERDESAAN SWADAYA (P4S)  
DAK NONFISIK TAHUN 2025

DAFTAR NAMA P4S PELAKSANA MAGANG USAHA TANI BAGI PETANI  
DI KABUPATEN/KOTA ... PROV ...  
TAHUN 2025

| No     | Nama P4S | Desa/Kecamatan | Jumlah Peserta<br>Pelatihan<br>(Orang) | Anggaran<br>(Rp.) |
|--------|----------|----------------|--|-------------------|
| 1      | 2        | 3              | 4                                      | 5                 |
| 1      |          |                |  |                   |
| 2      |          |                |  |                   |
| 3      |          |                |  |                   |
| Jumlah |          |                |  |                   |

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)  
... (*nama*)  
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA / PROVINSI...  
NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA/ PROVINSI...,

Menimbang :

- a. ... ;
- b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penyuluh Pertanian Penerima Insentif Penyuluh Pertanian,  
Honorarium dan BPJS Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai  
tugas:  
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya;  
c. menyampaikan laporan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaan  
kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai salah satu bentuk  
indikator kinerja setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,  
Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya  
serta Dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota ... .

KEEMPAT : Memberikan Insentif Penyuluh Pertanian senilai Rp.....,- (..... rupiah)  
setiap bulan selama 12 bulan yang dibayarkan sesuai dengan hasil laporan  
pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.  
Memberikan Honorarium senilai Rp. Rp.....,- (..... rupiah) dan tunjangan  
BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. Rp.....,- (..... rupiah) bagi THL-TBPP  
setiap bulan selama 12 bulan yang dibayarkan sesuai dengan hasil  
laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada  
DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota/Provinsi ... Tahun Anggaran ... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ...,

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati/Walikota/Gubernur ... ;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
- 4. Yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG PENETAPAN PENYULUH  
PERTANIAN PENERIMA BIAYA  
OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DATA PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TA 2025

| NO  | PROVINSI | KABUPAT<br>EN/KOTA | BPP | IDENTITAS PENYULUH PERTANIAN |     |                                   |                           |
|-----|----------|--------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------|
|     |          |                    |     | NAMA<br>LENGKAP              | NIK | Status<br>(PNS/PPPK<br>/ THLTBPP) | NIP/NI<br>/ NO<br>Peserta |
| 1   |          |                    |     |                              |     |                                   |                           |
| 2   |          |                    |     |                              |     |                                   |                           |
| 3   |          |                    |     |                              |     |                                   |                           |
| ... |          |                    |     |                              |     |                                   |                           |
| dst |          |                    |     |                              |     |                                   |                           |

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI  
....,

..... (*tanda tangan, nama dan  
stempel*)

NIP .....

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2025

Periode Bulan : .....  
Nama Penyuluh : .....  
Status : .....  
Wilayah Kerja : .....  
Provinsi : .....  
Kab/Kota : .....  
Kecamatan : .....  
Nama BPP : .....

| No | Tanggal    | Kegiatan                           | Tujuan          | Metode              | Materi               | Sasaran | Jml Sasaran | Output   | Foto/ Dokumentasi          |
|----|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|--|----------------------------|
| 1  | 02/01/2025 | Kunjungan ke kelompok tani Mandiri | Sosialisasi KUR | Ceramah dan diskusi | Cara Mendapatkan KUR | Petani  | 20 orang    | Peningkatan pemahaman Petani dalam permodalah usaha tani | Lampiran Dokumentasi/ Foto |
| 2  | Dst.       |                                    |                 |                     |                      |         |             |  |                            |
|    |            |                                    |                 |                     |                      |         |             |  |                            |

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Penyuluh Pertanian,

.....TTD.....  
Nama

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Operasional Pengujian Penyakit Hewan

Kegiatan operasional pengujian penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di laboratorium kesehatan hewan. Pelaksanaan kegiatan layanan pemeriksaan dan pengujian sampel dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyakit hewan. Dalam pelaksanaannya, rancangan sampling digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan dan mengukur prevalensi. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini akan digunakan dalam penentuan kebijakan dalam pemberantasan penyakit hewan melalui:

1. Penerima manfaat

Penerima manfaat meliputi Laboratorium Kesehatan Hewan, Puskesmas, peternak, kelompok peternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Laboratorium Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- a. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki Surat Keputusan Penetapan Petugas Penanggungjawab Laboratorium;
- b. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki Surat Keputusan Petugas Penguji Laboratorium Kesehatan Hewan;
- c. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki sistem informasi hasil pengujian untuk Data Pelaporan dan Data Pengujian Penyakit Hewan;
- d. Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinas provinsi melakukan pendampingan kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional pengujian penyakit hewan;
- f. Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I teknis terkait.
- g. Laboratorium Kesehatan Hewan wajib melakukan pemutahiran data infrastruktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima manfaat;
- b. Penyusunan rencana penggunaan dana (RPD)
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan di laboratorium kesehatan hewan; dan
- d. Pelaporan realisasi

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan melalui aplikasi KRISNA, ALADIN, *e-monev* dan *Integrated Veterinary Laboratory Information System (IVLab)*.

3. Pemanfaatan

Operasional Pengujian Penyakit Hewan dimanfaatkan untuk:

- a. Mengoptimalkan pengujian penyakit hewan;
- b. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan melalui pengujian penyakit pada unit yang terakreditasi;
- c. Meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
- d. Melaksanakan pemetaan status dan situasi penyakit hewan;
- e. Memperoleh data penyebaran penyakit melalui hasil pengujian sampel yang berasal dari masyarakat dan puskesmas melalui pelaporan iSIKHNAS.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Penggunaan anggaran dana DAK Nonfisik kegiatan operasional pengujian penyakit hewan agar tidak duplikasi dengan dana APBN atau APBD.

Pembiayaan pelaksanaan DAK Nonfisik kegiatan operasional pengujian penyakit hewan dapat disesuaikan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Provinsi.

Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Proses akreditasi

Proses akreditasi antara lain penyiapan dokumen dalam rencana pendaftaran, pelatihan/bimtek dalam mendukung akreditasi dan penyiapan dokumen permohonan, surveilans akreditasi, perpanjangan, dan kegiatan lainnya dalam proses yang mendukung implementasi akreditasi pengujian.

b. Bahan pengujian dan bahan habis pakai

Bahan pengujian dan bahan habis pakai digunakan untuk pengadaan bahan uji, reagen, Kit dan bahan habis pakai dalam pengujian penyakit. Penyediaan bahan pengujian penyakit hewan yang dapat dipilih sesuai status situasi penyakit hewan pada wilayah kerjanya dengan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner untuk penentuan fokus penyakit yang akan dilakukan penyidikan. Selain pengadaan bahan uji juga diperlukan bahan desinfektan guna menjamin biosafety kepada petugas penguji.

c. Operasional laboratorium

Operasional laboratorium digunakan untuk pemeliharaan dalam rangka penjaminan *biosecurity* dan *biosefety* untuk petugas seperti desinfeksi/sterilisasi/penyucihamaan alat dan ruangan menggunakan desinfektan.

d. Surveilans tidak lanjut kasus pelaporan penyakit dari petugas lapangan dan sampel kiriman perseorangan atau dinas.

Surveilans tidak lanjut kasus pelaporan penyakit ini dilakukan berdasarkan informasi yang tercatat dalam verifikasi laboratorium, akan dilakukan penentuan apakah kejadian penyakit hewan yang terjadi merupakan kasus individu hewan, mengarah ke penyakit hewan menular dan wabah atau hal lainnya, maka:

- (1) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan kasus individu hewan, maka akan disampaikan kepada pengirim sampel untuk dilakukan tindakan pengobatan individu hewan dan kegiatan penyidikan berakhir di sini.
- (2) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan penyakit hewan menular, maka kegiatan penyidikan dilanjutkan dengan pengambilan sampel pada wilayah dugaan penyebaran penyakit hewan oleh tim laboratorium kesehatan hewan.

- (3) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan wabah, maka kegiatan penyidikan dilanjutkan oleh Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner. Hasil uji laboratorium dilaporkan melalui *Integrated Veterinary Laboratory Information System* (IVLab).

## B. Layanan Operasional Puskesmas

Kegiatan layanan operasional Puskesmas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis layanan kesehatan hewan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

### 1. Penerima manfaat

Penerima manfaat meliputi Puskesmas, peternak, kelompok peternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskesmas sebagai berikut:

- a. Puskesmas yang memiliki surat keputusan kelembagaan dan surat keputusan penunjukan petugas dan pelapor pada aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS);
- b. Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner dengan status aparatur sipil negara atau tenaga kontrak yang memiliki surat keputusan penunjukan;
- c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas dan pelapor iSIKHNAS wajib melaporkan ke aplikasi iSIKHNAS;
- d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
- f. Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait.
- g. Puskesmas wajib melakukan pemutakhiran data infrastruktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS.

### 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
- b. penyusunan rencana penggunaan dana (RPD);
- c. pelaksanaan kegiatan layanan Puskesmas; dan
- d. pelaporan.

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan melalui aplikasi KRISNA, ALADIN, e-monev dan iSIKHNAS.

### 3. Pemanfaatan

Layanan Operasional Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan;
- b. memfasilitasi penyediaan obat hewan;
- c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
- d. melaksanakan pemetaan status dan situasi penyakit hewan;
- e. meningkatkan kapasitas SDM petugas Puskesmas; dan
- f. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan

Penggunaan anggaran dana DAK Nonfisik kegiatan layanan operasional Puskesmas agar tidak duplikasi dengan dana APBN atau APBD.

Pembiayaan pelaksanaan DAK Nonfisik kegiatan layanan operasional Puskesmas dapat disesuaikan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota.

Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obat Hewan

Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, vaksin, kit diagnostik, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia, tonika, antiseptik dan disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.

b. Bahan pendukung pengobatan

Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 70%, plastik, spuit, objek dan *cover glass* dan/atau Alat Pelindung Diri untuk petugas kesehatan hewan.

c. Operasional pelaporan iSIKHNAS

Operasional pelaporan iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi 2 (dua) orang petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12 bulan. Petugas wajib menyampaikan laporan layanan Puskesmas melalui laman <https://isikhnas.com> atau aplikasi *AIM iSIKHNAS*.

d. Operasional pelayanan kesehatan hewan

Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa pembiayaan transport atau perjalanan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Pembiayaan diberikan kepada petugas setiap melakukan kegiatan layanan kesehatan hewan berupa:

1. kegiatan pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi atau tindakan lain yang diperlukan pada hewan:

a) hewan besar (sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya) minimal 10 ekor

b) hewan kecil (kambing, domba, babi, dan sejenisnya) minimal 10 ekor

c) unggas minimal 50 ekor

2. kegiatan vaksinasi program pemerintah untuk anjing atau kucing minimal 10 ekor

e. Koordinasi

Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan kegiatan konsultasi atau menghadiri undangan rapat atau pertemuan lainnya ke provinsi atau kabupaten/kota.

f. Surveilans

Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau nasional.

g. Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel ke Laboratorium

Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi/Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji.

- h. Bimbingan teknis/pelatihan terkait kesehatan hewan  
Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan berupa biaya mengikuti kegiatan Pelatihan Pelayanan Puskesmas untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dokter hewan dan/atau paramedik veteriner sebagai petugas Puskesmas, yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Peternakan atau Kesehatan Hewan Pusat, Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner atau UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan lainnya.  
Penggunaan anggaran untuk Pelatihan Pelayanan Puskesmas meliputi pembayaran paket pelatihan, akomodasi, transportasi, uang harian/lumpsum, atau pembiayaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Layanan Penyuluh Pertanian

Layanan penyuluh pertanian dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian berupa layanan operasional BPP, SL tematik, dan magang usaha tani bagi petani di P4S. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP memiliki tugas diantaranya yaitu a) melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan b) melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

1. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan meliputi BPP, penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani, dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani di wilayah kerja BPP, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.

2. Kriteria CPCL

- a. Penetapan CPCL Layanan Operasional BPP melalui SK Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- b. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian; dan
- c. penetapan CPCL kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat oleh Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- b. penetapan calon penerima manfaat oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:
  - 1) melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
  - 2) menyusun rencana kebutuhan dan anggaran, meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen:
    - a) Layanan Operasional BPP;
    - b) SL Tematik; dan

- c) Magang Usaha Tani bagi petani di P4S.
  - d. pelaksanaan kegiatan oleh BPP, P4S dan Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.
4. Komponen pembiayaan
- Komponen pembiayaan terdiri atas:
- a. Layanan Operasional BPP meliputi pembiayaan untuk:
    - 1) Pengumpulan dan pengelolaan data informasi dan materi penyuluhan pertanian;
    - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana kerja;
    - 3) Supervisi gerakan pembangunan pertanian;
    - 4) Klinik konsultasi agribisnis; dan
    - 5) Temu usaha.
  - b. SL Tematik, meliputi pembiayaan untuk :
    - 1) Sosialisasi;
    - 2) Rembug tani;
    - 3) Kursus tani;
    - 4) *Farm field day* (FFD);
    - 5) Pengawalan dan pendampingan.
  - c. Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S, meliputi pembiayaan untuk:
    - 1) Perlengkapan peserta;
    - 2) Konsumsi (3 bulan);
    - 3) Dukungan administrasi; dan
    - 4) Perjalanan peserta.
5. Pelaksanaan Kegiatan
- Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Layanan Operasional BPP digunakan untuk memfasilitasi operasional BPP meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pengelolaan data pertanian, data potensi wilayah, dan informasi/ materi penyuluhan pertanian, meliputi:
      - a) data yang disajikan dalam bentuk display di BPP antara lain: struktur organisasi, peta wilayah kerja BPP, luas tanam/ luas panen/ provitas, data penerima pupuk subsidi dan data kelembagaan petani, dsb.;
      - b) laporan bulanan luas tanam dan luas panen komoditas tanaman pangan semusim di wilayah kerja BPP;
      - c) updating data melalui aplikasi Simluhtan dan terlaporkannya kegiatan penyuluhan pertanian;
      - d) fasilitas internet di BPP untuk kegiatan penyuluhan pertanian secara daring;
      - e) tersedianya materi dan informasi penyuluhan pertanian bulanan selama 12 bulan.
    - 2) Koordinasi dan sinergitas kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui:
      - a) rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian pusat dan/atau daerah;
      - b) rapat penyusunan rencana kerja pembangunan pertanian pusat dan/atau daerah,
      - c) menyusun jadwal pendampingan, pengawalan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- Langkah kerja:  
BPP bersama Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten/kota melaksanakan:

- a) rapat koordinasi untuk melaksanakan identifikasi semua kegiatan pusat dan daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP dan memastikan masuk ke dalam program penyuluhan;
  - b) penyusunan rencana kerja berdasarkan hasil identifikasi kegiatan pusat dan/atau daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP; dan
  - c) penyusunan jadwal pengawalan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan program dari pusat dan/atau daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP.
- 3) Pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian  
Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan program kementerian pertanian dan/atau pemerintah daerah dilakukan sesuai program yang sedang dilaksanakan kementerian maupun Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang mengacu pada rencana kerja/ juklak/juknis/penugasan pimpinan.
- 4) Melaksanakan klinik konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.  
Kegiatan klinik konsultasi agribisnis di BPP meliputi penyediaan ruangan, sarana, jadwal dan dokumentasi kegiatan konsultasi, meliputi:
- a) tersedia papan nama ruangan dan jadwal klinik konsultasi agribisnis;
  - b) materi konsultasi, informasi, dan permasalahan;
  - c) pelaksanaan konsultasi oleh pelaku utama;
  - d) dokumentasi dan laporan kegiatan berkala.
- Langkah kerja:  
Penyuluh pertanian melaksanakan langkah kerja sebagai berikut:
- a) membuat papan nama ruangan dan jadwal konsultasi agribisnis;
  - b) mengumpulkan informasi terkait permasalahan petani dalam usaha tani;
  - c) menyampaikan informasi dan jadwal konsultasi kepada kelompok tani /petani di wilayah kerja BPP;
  - d) mempersiapkan materi dan metode konsultasi;
  - e) melaksanakan konsultasi dan memberikan rekomendasi; dan
  - f) menyiapkan instrumen dan melaksanakan evaluasi.
- 5) Merancang pengembangan jejaring kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha.  
Terlaksananya kegiatan temu usaha antara petani/kelompok tani dan pelaku usaha pertanian, sehingga terjadi transfer informasi dan peluang kerjasama yang menguntungkan antar para pihak. Kegiatan temu usaha dilakukan minimal 2 (dua) kali kegiatan.  
Langkah kerja:  
Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian melakukan:
- a) identifikasi dan inventarisasi jenis usaha, komoditas yang diusahakan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - b) identifikasi calon mitra usaha petani dan aspek kerjasama/kemitraan;
  - c) perencanaan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan;

- d) pelaksanaan temu bisnis/ temu usaha; dan
  - e) pendampingan, pengawalan dan evaluasi kegiatan pengembangan jejaring kemitraan.
- 6) Waktu Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Operasional BPP diselenggarakan selama 12 bulan.
- 7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Layanan Operasional BPP disampaikan melalui emonev.
- b. SL Tematik diperuntukan bagi petani, perwakilan kelompok tani, penyuluh pertanian/pendamping, serta instansi daerah/pihak terkait lainnya. Mekanisme pelaksanaan SL Tematik meliputi:
- 1) Persiapan  
Persiapan SL Tematik dilakukan dengan tahapan:
    - a) Penentuan peserta SL Tematik  
Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
      - (1) Petani/kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan;
      - (2) Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan rembug tani;
      - (3) Jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) kelompok tani, setiap kelompok tanimenetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (total 30 orang);
      - (4) Peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        - (a) Anggota aktif dalam kelompok tani;
        - (b) Kelompok tani binaan penyuluh pertanian dan berada di wilayah kerja BPP;
        - (c) Wajib mengikuti kegiatan SL Tematik; dan
        - (d) Menyatakan kesanggupan mengikuti seluruh kegiatan SL Tematik dan menerapkan dalam usaha taninya.
    - b) Penentuan Pemandu SL Tematik  
Pemandu pelaksana SL Tematik berasal dari Penyuluh Pertanian atau pejabat fungsional bidang pertanian lain, dengan persyaratan sebagai berikut:
      - (1) Memiliki kompetensi sebagai fasilitator;
      - (2) Menguasai materi yang diampu/yang diajarkan;
      - (3) Menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi;
      - (4) Mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar;
      - (5) Mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran; dan
      - (6) Ditugaskan oleh pimpinan unit kerja.
    - c) Penetapan Lokasi, Peserta, dan Pemandu SL Tematik.  
Lokasi, Peserta dan Pemandu SL Tematik ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

- d) Penetapan Waktu Pelaksanaan SL Tematik.  
Penetapan waktu pelaksanaan SL Tematik disepakati bersama sesuai hasil rembuk tani.
- e) Pemilihan Materi/Tema SL Tematik; dan  
Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar petani anggota kelompok tanipeserta SL Tematik.
- 2) Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penjelasan SL Tematik sesuai komoditas yang dipilih kepada pemangku kepentingan di Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian, BPP, Kecamatan, dan petani anggota kelompok tani agar tercapai kesamaan persepsi.
- 3) Rembug Tani  
Rembug tani dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan: siapa, kapan, dimana, komoditas apa, dan materi/teknologi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan SL Tematik. Rembug tani dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan SL Tematik.
- 4) Kursus Tani  
Pembelajaran dalam kursus tani menggunakan metode andradogi melalui praktik, penerapan inovasi teknologi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan dalam bentuk demplot percontohan sehingga peserta dapat memahami, dan menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) musim tanam atau 1 (satu) periode kegiatan. Pelaksanaan disesuaikan komoditas SL Tematik sesuai dengan potensi lokalita serta memperhatikan kesesuaian atau sesuai rekomendasi inovasi teknologi pertanian yang diterapkan.
- 5) Kebutuhan bahan pembelajaran untuk masing-masing sub-sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Kegiatan   | Waktu                | Bahan Pembelajaran*)  |
|----|--|----------------------|---|
| 1. | SL Tematik Tanaman Pangan (Padi, Jagung, kedelai)                    | 1 musim tanam        | Luasan minimal 2 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)                         |
| 2. | SL Tematik Hortikultura (cabai, bawang merah, tanaman sayuran, dll.) | 1 musim tanam        | Luasan minimal 0,3 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, <i>screen house</i> dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)   |
| 3. | SL Tematik Perkebunan (tebu, kopi, kakao)                            | 1 periode kegiatan   | Luasan minimal 1 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)                         |
| 4. | SL Tematik Peternakan (unggas, kambing/domba, sapi)                  | 1 periode pembesaran | 1) Pembesaran unggas(ayam/bebek/itik) = minimal 250 ekor bibit anakan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja |

| No | Kegiatan | Waktu                 | Bahan Pembelajaran*)   |
|----|----------|-----------------------|--|
|    |          | 1 periode penggemukan | 2) Penggemukan kambing/domba = minimal 10 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja |
|    |          | 1 periode penggemukan | 3) Penggemukan sapi = minimal 2 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja           |

\*) Bahan Pembelajaran dan luasan/populasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran

Kegiatan pertemuan pembelajaran/kursus tani dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali pertemuan selama pelaksanaan SL Tematik dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan tanaman atau sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah disusun sesuai tema kegiatan SL Tematik atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran SL Tematik disesuaikan dengan tema kegiatan SL Tematik sesuai komoditas unggulan setempat, dilaksanakan dalam bentuk kursus tani dengan jumlah pertemuan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.

- 6) Farmer Field Day (FFD)
 

FFD dilaksanakan 1 (satu) kali selama pelaksanaan SL Tematik dalam rangka menunjukkan hasil pelaksanaan SL Tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat FFD pemandu/penyuluh pendamping dan petani mampu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan SL Tematik dan menghadirkan petani di luar peserta SL Tematik, para pengambil kebijakan, offtaker, dan pemangku kepentingan terkait.
- 7) Pengawasan dan Pendampingan
  - a) Pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian sebagai penanggung jawab DAK Nonfisik dan sebagai pelaksana kegiatan;
  - b) Pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari sosialisasi, rebug, pelaksanaan, FFD melalui kunjungan langsung ke lapangan, dan secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan;
  - c) pengawasan dan pendampingan teknis oleh Penyuluh Pertanian di BPP pelaksana SL Tematik.
- 8) Pelaporan
 

Laporan SL Tematik dibuat oleh penyuluh pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik dengan tahapan sebagai berikut:

  - a) mendokumentasikan lokasi pelaksanaan SL Tematik sebelum dilaksanakan kegiatan SL Tematik, dengan cara open camera, dan mencatat produksi dan produktivitas sebelum pelaksanaan SL Tematik;
  - b) merekap kehadiran peserta;

- c) mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta;
- d) mencatat produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan kegiatan SL Tematik;
- e) mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan SL Tematik menggunakan *open camera*;
- f) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL Tematik (meliputi metode, bahan pembelajaran, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi, dan lain - lain)
- g) hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Kepala/Koordinator BPP, Dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- h) laporan pelaksanaan SL Tematik yang disusun oleh Penyuluh Pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik, diketahui oleh kepala/koordinator BPP dan Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian serta ditembuskan ke Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi.

c. Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S

Magang usaha tani adalah program pelatihan praktis yang memberikan peserta, terutama petani pemula atau petani muda, kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aspek usaha tani. Selama magang, peserta mempelajari keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan terkait dengan produksi pertanian, manajemen lahan, penggunaan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil tani.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan usaha tani yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pasar. Program ini dilaksanakan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), dengan bimbingan mentor atau fasilitator ahli.

1) Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima Manfaat kegiatan magang usaha tani adalah petani pemula atau petani muda yang berada di lokasi wilayah kerja BPP.

2) Kriteria CP/CL

- a) Petani atau pelaku usaha tani yang memiliki minat belajar untuk mengembangkan usaha agribisnis;
- b) Usia 18-40 tahun;
- c) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan magang yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara;
- d) Surat perizinan dari keluarga;
- e) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f) Mendapatkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.

3) Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan magang usaha tani bagi petani di P4S terdiri dari:

- a) Perlengkapan peserta digunakan untuk membiayai perlengkapan magang, bahan praktek dan P3K peserta magang;

- b) Konsumsi digunakan untuk membiayai makan dan kudapan selama magang;
  - c) Dukungan administrasi digunakan untuk kebutuhan penggandaan dokumen, alat tulis permagangan, pembuatan spanduk dan/atau *backdrop*, serta dokumentasi kegiatan magang; dan
  - d) Perjalanan peserta digunakan untuk membiayai transport, uang saku dan akomodasi peserta.
- 4) Tahapan Pelaksanaan permagangan di P4S meliputi:
- a) Persiapan
    - (1) Identifikasi kebutuhan permagangan dan perumusan materi  
Kebutuhan permagangan dapat diidentifikasi berdasarkan isu terkini, permintaan petani ataupun kelompok tani, program utama Kementerian Pertanian. Berdasarkan identifikasi kebutuhan permagangan, sumberdaya yang tersedia serta kondisi umum calon pemagang, maka dirumuskan materi permagangan dan unit kompetensi yang sesuai.
    - (2) Penetapan rancangan permagangan  
Materi permagangan selanjutnya dilengkapi dengan kurikulum magang, metodologi permagangan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*Andragogy*) atau pendekatan *Experiential Learning Cycle (ELC)* atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan), bahan permagangan berupa modul, bahan ajar, petunjuk lapangan (petlap), bahan tayang ataupun serahan lainnya.
    - (3) Sosialisasi  
Sosialisasi permagangan dilakukan paling lama 2 bulan sebelum pelaksanaan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian dan Forum Komunikasi P4S. Sosialisasi permagangan meliputi syarat atau kriteria peserta magang, panduan, lokasi dan tema.  
P4S sebagai pelaksana program berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian untuk menentukan jumlah peserta dan kriteria seleksi.
    - (4) Pendaftaran Magang Petani Muda di P4S  
Berkas pendaftaran yang harus dilengkapi adalah:
      - (a) Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
      - (b) Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian setempat;
      - (c) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
      - (d) Daftar riwayat hidup atau biodata singkat, khususnya pengalaman di bidang pertanian;
      - (e) Surat pernyataan kesediaan mengikuti magang secara penuh.
  - b) Tahapan Pelaksanaan
    - (1) Orientasi;
    - (2) Pembekalan Teori;
    - (3) Magang Usaha Tani;

- (4) Sikronisasi dan Refleksi Hasil Magang; dan
  - (5) Asesmen atas kemajuan Magang.
- c) Tema permagangan  
Tema permagangan disesuaikan dengan kebutuhan peserta setelah dilakukan identifikasi kebutuhan. Tema permagangan dapat berupa:
    - (1) Budidaya;
    - (2) Pengolahan hasil;
    - (3) Marketing; dan
    - (4) Tema lainnya.
  - d) Waktu pelaksanaan  
Permagangan diselenggarakan paling lama 3 bulan menyesuaikan dari tema permagangan.
  - e) Pengorganisasian permagangan  
Pengorganisasian permagangan mencakup pengelolaan dan penerapan seluruh unsur mulai dari rancangan materi, alat dan bahan, sarana dan prasarana, metode, peserta magang, fasilitator, kepanitiaan, serta tempat dan waktu pelaksanaan permagangan.
  - f) Monitoring Permagangan  
Monitoring kegiatan magang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan magang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan bimbingan lanjutan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada setiap tahapan tersebut.
  - g) Pengawasan dan Pendampingan  
Dalam pelaksanaan kegiatan magang petani di P4S, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, efektif, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembina P4S dan pihak lainnya.
  - h) Evaluasi dan Pelaporan  
Evaluasi dilakukan di akhir permagangan yang mencakup evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran yang dapat menunjukkan peningkatan kapasitas peserta magang. Selain itu, pada akhir kegiatan juga disusun rencana tindak lanjut (RTL) peserta dan pelaporan kegiatan magang.
- 5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Magang Usaha Tani di P4S disampaikan melalui emonev.

| LAPORAN PENYELENGGARAAN MAGANG USAHA TANI BAGI<br>PETANI DI P4S |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
|---|----------|--------------------|----------------|--------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| No  | Nama P4S | Desa/<br>Kecamatan | Tema<br>Magang | Metode | Jumlah<br>Peserta | Durasi<br>Magang | Jumlah<br>Anggaran | Permasalahan/<br>Kendala | Pemecahan<br>Masalah | Tindak Lanjut |
| 1   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
| 2   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
| 3   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
| 4   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
| 5   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |
| dst   |          |                    |                |        |                   |                  |                    |                          |                      |               |

Kabupaten/Kota..../..../.../2025  
KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,  
... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

D. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Biaya operasional penyuluh pertanian yang diberikan selama 12 bulan berupa insentif penyuluh pertanian diberikan kepada penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok tani, serta Honorarium dan BPJS kepada THL-TBPP.

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat biaya operasional penyuluh pertanian adalah penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP

2. Kriteria Penerima Manfaat

a. Persyaratan Penyuluh Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP yang menerima insentif penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluh pertanian PNS/PPPK yang telah diangkat menjadi fungsional sesuai dengan SK pengangkatan jabatan fungsional;
- 2) Penyuluh Pertanian PNS/PPPK yang tidak sedang dalam tugas belajar/ijin belajar;
- 3) Penyuluh Pertanian PNS yang tidak mendapatkan tugas manajerial;
- 4) Penyuluh Pertanian PNS/PPPK yang tidak menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- 5) THL-TBPP yang direkrut oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2007-2009 yang direkomendasikan oleh Pemda dan disahkan oleh Kementerian Pertanian.
- 6) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- 7) Penyuluh Pertanian PNS, PPPK dan THL-TBPP yang mendapatkan rekomendasi kinerja baik berdasarkan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian;
- 8) Penyuluh Pertanian yang telah membuat dan melaporkan hasil kerja ke aplikasi ePusluh.

b. Pelaksanaan

Penyaluran biaya operasional penyuluh pertanian berdasarkan SK Kepala Dinas hasil verifikasi dan validasi data jumlah penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THP-TBPP di wilayahnya, serta ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian. Mekanisme penyaluran biaya operasional penyuluh pertanian sebagai berikut:

- 1) Insentif penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP, serta Honorarium THL-TBPP
  - a) Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian melakukan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan Laporan Kegiatan Penyuluh Pertanian;
  - b) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Badan PPSDMP untuk memperoleh rekomendasi melalui aplikasi ePusluh;
  - c) Rekomendasi Badan PPSDMP disampaikan kepada Dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian untuk diteruskan kepada perangkat daerah pengelola keuangan daerah sebagai dasar penyaluran kepada Penyuluh Pertanian;
  - d) Pembayaran insentif penyuluh aparatur sipil negara dan THL-TBPP setiap bulannya paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, serta honorarium THL-TBPP setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali untuk kinerja bulan November dan Desember setelah mendapat rekomendasi dari Badan PPSDMP.
- 2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan selama 12 bulan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Biaya Operasional Penyuluh Pertanian disampaikan melalui emonev

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA

A. Sub Jenis Pertanian

| NO  | NAMA DAERAH             | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                     | (3)                  |
| 1   | Provinsi Aceh           | 150.000              |
| 2   | Kab. Aceh Barat         | 0                    |
| 3   | Kab. Aceh Besar         | 0                    |
| 4   | Kab. Aceh Selatan       | 0                    |
| 5   | Kab. Aceh Singkil       | 0                    |
| 6   | Kab. Aceh Tengah        | 0                    |
| 7   | Kab. Aceh Tenggara      | 0                    |
| 8   | Kab. Aceh Timur         | 0                    |
| 9   | Kab. Aceh Utara         | 0                    |
| 10  | Kab. Bireuen            | 0                    |
| 11  | Kab. Pidie              | 4.548.715            |
| 12  | Kab. Simeulue           | 0                    |
| 13  | Kota Banda Aceh         | 0                    |
| 14  | Kota Sabang             | 0                    |
| 15  | Kota Langsa             | 0                    |
| 16  | Kota Lhokseumawe        | 0                    |
| 17  | Kab. Gayo Lues          | 0                    |
| 18  | Kab. Aceh Barat Daya    | 0                    |
| 19  | Kab. Aceh Jaya          | 0                    |
| 20  | Kab. Nagan Raya         | 0                    |
| 21  | Kab. Aceh Tamiang       | 0                    |
| 22  | Kab. Bener Meriah       | 0                    |
| 23  | Kab. Pidie Jaya         | 0                    |
| 24  | Kota Subulussalam       | 0                    |
| 25  | Provinsi Sumatera Utara | 0                    |
| 26  | Kab. Asahan             | 0                    |
| 27  | Kab. Dairi              | 0                    |
| 28  | Kab. Deli Serdang       | 0                    |
| 29  | Kab. Karo               | 0                    |
| 30  | Kab. Labuhanbatu        | 0                    |
| 31  | Kab. Langkat            | 4.159.915            |
| 32  | Kab. Mandailing Natal   | 0                    |
| 33  | Kab. Nias               | 0                    |
| 34  | Kab. Simalungun         | 0                    |
| 35  | Kab. Tapanuli Selatan   | 0                    |
| 36  | Kab. Tapanuli Tengah    | 1.454.400            |
| 37  | Kab. Tapanuli Utara     | 2.294.400            |

| NO | NAMA DAERAH              | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|----|--------------------------|----------------------|
| 38 | Kab. Toba                | 0                    |
| 39 | Kota Binjai              | 0                    |
| 40 | Kota Medan               | 0                    |
| 41 | Kota Pematang Siantar    | 0                    |
| 42 | Kota Sibolga             | 0                    |
| 43 | Kota Tanjung Balai       | 0                    |
| 44 | Kota Tebing Tinggi       | 0                    |
| 45 | Kota Padang Sidempuan    | 0                    |
| 46 | Kab. Pakpak Bharat       | 1.120.000            |
| 47 | Kab. Nias Selatan        | 0                    |
| 48 | Kab. Humbang Hasundutan  | 1.400.000            |
| 49 | Kab. Serdang Bedagai     | 0                    |
| 50 | Kab. Samosir             | 0                    |
| 51 | Kab. Batu Bara           | 0                    |
| 52 | Kab. Padang Lawas        | 0                    |
| 53 | Kab. Padang Lawas Utara  | 0                    |
| 54 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 0                    |
| 55 | Kab. Labuhanbatu Utara   | 0                    |
| 56 | Kab. Nias Utara          | 0                    |
| 57 | Kab. Nias Barat          | 0                    |
| 58 | Kota Gunungsitoli        | 0                    |
| 59 | Provinsi Sumatera Barat  | 150.000              |
| 60 | Kab. Lima Puluh Kota     | 0                    |
| 61 | Kab. Agam                | 0                    |
| 62 | Kab. Kepulauan Mentawai  | 0                    |
| 63 | Kab. Padang Pariaman     | 0                    |
| 64 | Kab. Pasaman             | 0                    |
| 65 | Kab. Pesisir Selatan     | 0                    |
| 66 | Kab. Sijunjung           | 0                    |
| 67 | Kab. Solok               | 4.164.460            |
| 68 | Kab. Tanah Datar         | 0                    |
| 69 | Kota Bukit Tinggi        | 0                    |
| 70 | Kota Padang Panjang      | 0                    |
| 71 | Kota Padang              | 0                    |
| 72 | Kota Payakumbuh          | 0                    |
| 73 | Kota Sawahlunto          | 0                    |
| 74 | Kota Solok               | 0                    |
| 75 | Kota Pariaman            | 0                    |
| 76 | Kab. Pasaman Barat       | 2.285.515            |
| 77 | Kab. Dharmasraya         | 0                    |
| 78 | Kab. Solok Selatan       | 0                    |
| 79 | Provinsi Riau            | 150.000              |
| 80 | Kab. Bengkalis           | 3.678.400            |
| 81 | Kab. Indragiri Hilir     | 0                    |
| 82 | Kab. Indragiri Hulu      | 0                    |
| 83 | Kab. Kampar              | 0                    |
| 84 | Kab. Kuantan Singingi    | 0                    |
| 85 | Kab. Pelalawan           | 0                    |
| 86 | Kab. Rokan Hilir         | 0                    |
| 87 | Kab. Rokan Hulu          | 0                    |
| 88 | Kab. Siak                | 0                    |
| 89 | Kota Dumai               | 0                    |
| 90 | Kota Pekanbaru           | 0                    |
| 91 | Kab. Kepulauan Meranti   | 1.454.400            |
| 92 | Provinsi Jambi           | 0                    |
| 93 | Kab. Batang Hari         | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH                     | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 94  | Kab. Bungo                      | 0                    |
| 95  | Kab. Kerinci                    | 0                    |
| 96  | Kab. Merangin                   | 0                    |
| 97  | Kab. Muaro Jambi                | 0                    |
| 98  | Kab. Sarolangun                 | 0                    |
| 99  | Kab. Tanjung Jabung Barat       | 0                    |
| 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur       | 0                    |
| 101 | Kab. Tebo                       | 0                    |
| 102 | Kota Jambi                      | 0                    |
| 103 | Kota Sungai Penuh               | 0                    |
| 104 | Provinsi Sumatera Selatan       | 150.000              |
| 105 | Kab. Lahat                      | 0                    |
| 106 | Kab. Musi Banyuasin             | 0                    |
| 107 | Kab. Musi Rawas                 | 0                    |
| 108 | Kab. Muara Enim                 | 0                    |
| 109 | Kab. Ogan Komering Ilir         | 0                    |
| 110 | Kab. Ogan Komering Ulu          | 0                    |
| 111 | Kota Palembang                  | 0                    |
| 112 | Kota Prabumulih                 | 0                    |
| 113 | Kota Pagar Alam                 | 0                    |
| 114 | Kota Lubuk Linggau              | 0                    |
| 115 | Kab. Banyuasin                  | 3.328.800            |
| 116 | Kab. Ogan Ilir                  | 0                    |
| 117 | Kab. OKU Timur                  | 8.114.860            |
| 118 | Kab. OKU Selatan                | 0                    |
| 119 | Kab. Empat Lawang               | 0                    |
| 120 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0                    |
| 121 | Kab. Musi Rawas Utara           | 0                    |
| 122 | Provinsi Bengkulu               | 0                    |
| 123 | Kab. Bengkulu Selatan           | 0                    |
| 124 | Kab. Bengkulu Utara             | 0                    |
| 125 | Kab. Rejang Lebong              | 0                    |
| 126 | Kota Bengkulu                   | 0                    |
| 127 | Kab. Kaur                       | 0                    |
| 128 | Kab. Seluma                     | 0                    |
| 129 | Kab. Mukomuko                   | 0                    |
| 130 | Kab. Lebong                     | 0                    |
| 131 | Kab. Kepahiang                  | 0                    |
| 132 | Kab. Bengkulu Tengah            | 0                    |
| 133 | Provinsi Lampung                | 150.000              |
| 134 | Kab. Lampung Barat              | 0                    |
| 135 | Kab. Lampung Selatan            | 0                    |
| 136 | Kab. Lampung Tengah             | 0                    |
| 137 | Kab. Lampung Utara              | 3.997.600            |
| 138 | Kab. Lampung Timur              | 0                    |
| 139 | Kab. Tanggamus                  | 0                    |
| 140 | Kab. Tulang Bawang              | 0                    |
| 141 | Kab. Way Kanan                  | 0                    |
| 142 | Kota Bandar Lampung             | 0                    |
| 143 | Kota Metro                      | 0                    |
| 144 | Kab. Pesawaran                  | 0                    |
| 145 | Kab. Pringsewu                  | 0                    |
| 146 | Kab. Mesuji                     | 0                    |
| 147 | Kab. Tulang Bawang Barat        | 0                    |
| 148 | Kab. Pesisir Barat              | 0                    |
| 149 | Provinsi DKI Jakarta            | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH          | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|----------------------|----------------------|
| 150 | Provinsi Jawa Barat  | 150.000              |
| 151 | Kab. Bandung         | 0                    |
| 152 | Kab. Bekasi          | 0                    |
| 153 | Kab. Bogor           | 0                    |
| 154 | Kab. Ciamis          | 0                    |
| 155 | Kab. Cianjur         | 0                    |
| 156 | Kab. Cirebon         | 0                    |
| 157 | Kab. Garut           | 8.278.860            |
| 158 | Kab. Indramayu       | 0                    |
| 159 | Kab. Karawang        | 0                    |
| 160 | Kab. Kuningan        | 3.763.115            |
| 161 | Kab. Majalengka      | 5.098.945            |
| 162 | Kab. Purwakarta      | 0                    |
| 163 | Kab. Subang          | 4.977.600            |
| 164 | Kab. Sukabumi        | 0                    |
| 165 | Kab. Sumedang        | 0                    |
| 166 | Kab. Tasikmalaya     | 0                    |
| 167 | Kota Bandung         | 0                    |
| 168 | Kota Bekasi          | 0                    |
| 169 | Kota Bogor           | 0                    |
| 170 | Kota Cirebon         | 0                    |
| 171 | Kota Depok           | 0                    |
| 172 | Kota Sukabumi        | 0                    |
| 173 | Kota Tasikmalaya     | 0                    |
| 174 | Kota Cimahi          | 0                    |
| 175 | Kota Banjar          | 0                    |
| 176 | Kab. Bandung Barat   | 0                    |
| 177 | Kab. Pangandaran     | 0                    |
| 178 | Provinsi Jawa Tengah | 450.000              |
| 179 | Kab. Banjarnegara    | 5.880.205            |
| 180 | Kab. Banyumas        | 0                    |
| 181 | Kab. Batang          | 0                    |
| 182 | Kab. Blora           | 3.536.630            |
| 183 | Kab. Boyolali        | 0                    |
| 184 | Kab. Brebes          | 2.963.200            |
| 185 | Kab. Cilacap         | 5.284.460            |
| 186 | Kab. Demak           | 0                    |
| 187 | Kab. Grobogan        | 5.123.030            |
| 188 | Kab. Jepara          | 0                    |
| 189 | Kab. Karanganyar     | 0                    |
| 190 | Kab. Kebumen         | 0                    |
| 191 | Kab. Kendal          | 0                    |
| 192 | Kab. Klaten          | 7.109.005            |
| 193 | Kab. Kudus           | 0                    |
| 194 | Kab. Magelang        | 0                    |
| 195 | Kab. Pati            | 4.625.430            |
| 196 | Kab. Pekalongan      | 0                    |
| 197 | Kab. Pemasang        | 2.899.915            |
| 198 | Kab. Purbalingga     | 0                    |
| 199 | Kab. Purworejo       | 0                    |
| 200 | Kab. Rembang         | 0                    |
| 201 | Kab. Semarang        | 0                    |
| 202 | Kab. Sragen          | 4.615.660            |
| 203 | Kab. Sukoharjo       | 0                    |
| 204 | Kab. Tegal           | 0                    |
| 205 | Kab. Temanggung      | 3.188.800            |

| NO  | NAMA DAERAH               | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 206 | Kab. Wonogiri             | 4.828.715            |
| 207 | Kab. Wonosobo             | 0                    |
| 208 | Kota Magelang             | 0                    |
| 209 | Kota Pekalongan           | 0                    |
| 210 | Kota Salatiga             | 0                    |
| 211 | Kota Semarang             | 0                    |
| 212 | Kota Surakarta            | 0                    |
| 213 | Kota Tegal                | 0                    |
| 214 | Provinsi DI Yogyakarta    | 150.000              |
| 215 | Kab. Bantul               | 0                    |
| 216 | Kab. Gunung Kidul         | 6.183.405            |
| 217 | Kab. Kulon Progo          | 4.012.800            |
| 218 | Kab. Sleman               | 0                    |
| 219 | Kota Yogyakarta           | 0                    |
| 220 | Provinsi Jawa Timur       | 450.000              |
| 221 | Kab. Bangkalan            | 4.562.145            |
| 222 | Kab. Banyuwangi           | 0                    |
| 223 | Kab. Blitar               | 0                    |
| 224 | Kab. Bojonegoro           | 0                    |
| 225 | Kab. Bondowoso            | 0                    |
| 226 | Kab. Gresik               | 0                    |
| 227 | Kab. Jember               | 0                    |
| 228 | Kab. Jombang              | 0                    |
| 229 | Kab. Kediri               | 5.131.030            |
| 230 | Kab. Lamongan             | 0                    |
| 231 | Kab. Lumajang             | 0                    |
| 232 | Kab. Madiun               | 0                    |
| 233 | Kab. Magetan              | 0                    |
| 234 | Kab. Malang               | 0                    |
| 235 | Kab. Mojokerto            | 0                    |
| 236 | Kab. Nganjuk              | 4.453.345            |
| 237 | Kab. Ngawi                | 0                    |
| 238 | Kab. Pacitan              | 0                    |
| 239 | Kab. Pamekasan            | 0                    |
| 240 | Kab. Pasuruan             | 0                    |
| 241 | Kab. Ponorogo             | 0                    |
| 242 | Kab. Probolinggo          | 4.526.400            |
| 243 | Kab. Sampang              | 0                    |
| 244 | Kab. Sidoarjo             | 0                    |
| 245 | Kab. Situbondo            | 0                    |
| 246 | Kab. Sumenep              | 4.363.200            |
| 247 | Kab. Trenggalek           | 0                    |
| 248 | Kab. Tuban                | 4.906.315            |
| 249 | Kab. Tulungagung          | 5.090.945            |
| 250 | Kota Blitar               | 0                    |
| 251 | Kota Kediri               | 0                    |
| 252 | Kota Madiun               | 0                    |
| 253 | Kota Malang               | 0                    |
| 254 | Kota Mojokerto            | 0                    |
| 255 | Kota Pasuruan             | 0                    |
| 256 | Kota Probolinggo          | 0                    |
| 257 | Kota Surabaya             | 0                    |
| 258 | Kota Batu                 | 0                    |
| 259 | Provinsi Kalimantan Barat | 0                    |
| 260 | Kab. Bengkayang           | 0                    |
| 261 | Kab. Landak               | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH                 | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 262 | Kab. Kapuas Hulu            | 0                    |
| 263 | Kab. Ketapang               | 0                    |
| 264 | Kab. Mempawah               | 0                    |
| 265 | Kab. Sambas                 | 0                    |
| 266 | Kab. Sanggau                | 0                    |
| 267 | Kab. Sintang                | 0                    |
| 268 | Kota Pontianak              | 0                    |
| 269 | Kota Singkawang             | 0                    |
| 270 | Kab. Sekadau                | 0                    |
| 271 | Kab. Melawi                 | 0                    |
| 272 | Kab. Kayong Utara           | 0                    |
| 273 | Kab. Kubu Raya              | 0                    |
| 274 | Provinsi Kalimantan Tengah  | 150.000              |
| 275 | Kab. Barito Selatan         | 0                    |
| 276 | Kab. Barito Utara           | 0                    |
| 277 | Kab. Kapuas                 | 4.543.490            |
| 278 | Kab. Kotawaringin Barat     | 0                    |
| 279 | Kab. Kotawaringin Timur     | 0                    |
| 280 | Kota Palangkaraya           | 0                    |
| 281 | Kab. Katingan               | 0                    |
| 282 | Kab. Seruyan                | 0                    |
| 283 | Kab. Sukamara               | 0                    |
| 284 | Kab. Lamandau               | 0                    |
| 285 | Kab. Gunung Mas             | 0                    |
| 286 | Kab. Pulang Pisau           | 1.897.600            |
| 287 | Kab. Murung Raya            | 0                    |
| 288 | Kab. Barito Timur           | 0                    |
| 289 | Provinsi Kalimantan Selatan | 0                    |
| 290 | Kab. Banjar                 | 0                    |
| 291 | Kab. Barito Kuala           | 0                    |
| 292 | Kab. Hulu Sungai Selatan    | 0                    |
| 293 | Kab. Hulu Sungai Tengah     | 0                    |
| 294 | Kab. Hulu Sungai Utara      | 0                    |
| 295 | Kab. Kotabaru               | 0                    |
| 296 | Kab. Tabalong               | 0                    |
| 297 | Kab. Tanah Laut             | 0                    |
| 298 | Kab. Tapin                  | 0                    |
| 299 | Kota Banjarbaru             | 0                    |
| 300 | Kota Banjarmasin            | 0                    |
| 301 | Kab. Balangan               | 0                    |
| 302 | Kab. Tanah Bumbu            | 0                    |
| 303 | Provinsi Kalimantan Timur   | 0                    |
| 304 | Kab. Berau                  | 0                    |
| 305 | Kab. Kutai Kartanegara      | 0                    |
| 306 | Kab. Kutai Barat            | 0                    |
| 307 | Kab. Kutai Timur            | 0                    |
| 308 | Kab. Paser                  | 0                    |
| 309 | Kota Balikpapan             | 0                    |
| 310 | Kota Bontang                | 0                    |
| 311 | Kota Samarinda              | 0                    |
| 312 | Kab. Penajam Paser Utara    | 0                    |
| 313 | Kab. Mahakam Ulu            | 0                    |
| 314 | Provinsi Sulawesi Utara     | 0                    |
| 315 | Kab. Bolaang Mongondow      | 0                    |
| 316 | Kab. Minahasa               | 0                    |
| 317 | Kab. Kepulauan Sangihe      | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH                      | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 318 | Kota Bitung                      | 0                    |
| 319 | Kota Manado                      | 0                    |
| 320 | Kab. Kepulauan Talaud            | 0                    |
| 321 | Kab. Minahasa Selatan            | 0                    |
| 322 | Kota Tomohon                     | 0                    |
| 323 | Kab. Minahasa Utara              | 0                    |
| 324 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 0                    |
| 325 | Kota Kotamobagu                  | 0                    |
| 326 | Kab. Bolaang Mongondow Utara     | 0                    |
| 327 | Kab. Minahasa Tenggara           | 0                    |
| 328 | Kab. Bolaang Mongondow Timur     | 0                    |
| 329 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan   | 0                    |
| 330 | Provinsi Sulawesi Tengah         | 0                    |
| 331 | Kab. Banggai                     | 0                    |
| 332 | Kab. Banggai Kepulauan           | 0                    |
| 333 | Kab. Buol                        | 0                    |
| 334 | Kab. Toli-Toli                   | 0                    |
| 335 | Kab. Donggala                    | 0                    |
| 336 | Kab. Morowali                    | 0                    |
| 337 | Kab. Poso                        | 0                    |
| 338 | Kota Palu                        | 0                    |
| 339 | Kab. Parigi Moutong              | 0                    |
| 340 | Kab. Tojo Una Una                | 0                    |
| 341 | Kab. Sigi                        | 0                    |
| 342 | Kab. Banggai Laut                | 0                    |
| 343 | Kab. Morowali Utara              | 0                    |
| 344 | Provinsi Sulawesi Selatan        | 150.000              |
| 345 | Kab. Bantaeng                    | 0                    |
| 346 | Kab. Barru                       | 0                    |
| 347 | Kab. Bone                        | 4.719.915            |
| 348 | Kab. Bulukumba                   | 0                    |
| 349 | Kab. Enrekang                    | 0                    |
| 350 | Kab. Gowa                        | 0                    |
| 351 | Kab. Jeneponto                   | 0                    |
| 352 | Kab. Luwu                        | 0                    |
| 353 | Kab. Luwu Utara                  | 0                    |
| 354 | Kab. Maros                       | 0                    |
| 355 | Kab. Pangkajene Kepulauan        | 0                    |
| 356 | Kota Palopo                      | 0                    |
| 357 | Kab. Luwu Timur                  | 0                    |
| 358 | Kab. Pinrang                     | 2.782.230            |
| 359 | Kab. Sinjai                      | 0                    |
| 360 | Kab. Kepulauan Selayar           | 0                    |
| 361 | Kab. Sidenreng Rappang           | 0                    |
| 362 | Kab. Soppeng                     | 0                    |
| 363 | Kab. Takalar                     | 0                    |
| 364 | Kab. Tana Toraja                 | 0                    |
| 365 | Kab. Wajo                        | 2.737.600            |
| 366 | Kota Pare-pare                   | 0                    |
| 367 | Kota Makassar                    | 0                    |
| 368 | Kab. Toraja Utara                | 0                    |
| 369 | Provinsi Sulawesi Tenggara       | 150.000              |
| 370 | Kab. Buton                       | 0                    |
| 371 | Kab. Konawe                      | 5.907.745            |
| 372 | Kab. Kolaka                      | 0                    |
| 373 | Kab. Muna                        | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH                  | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 374 | Kota Kendari                 | 0                    |
| 375 | Kota Bau-bau                 | 0                    |
| 376 | Kab. Konawe Selatan          | 0                    |
| 377 | Kab. Bombana                 | 0                    |
| 378 | Kab. Wakatobi                | 0                    |
| 379 | Kab. Kolaka Utara            | 0                    |
| 380 | Kab. Konawe Utara            | 0                    |
| 381 | Kab. Buton Utara             | 0                    |
| 382 | Kab. Konawe Kepulauan        | 0                    |
| 383 | Kab. Kolaka Timur            | 0                    |
| 384 | Kab. Muna Barat              | 0                    |
| 385 | Kab. Buton Tengah            | 0                    |
| 386 | Kab. Buton Selatan           | 0                    |
| 387 | Provinsi Bali                | 0                    |
| 388 | Kab. Badung                  | 0                    |
| 389 | Kab. Bangli                  | 0                    |
| 390 | Kab. Buleleng                | 0                    |
| 391 | Kab. Gianyar                 | 0                    |
| 392 | Kab. Jembrana                | 0                    |
| 393 | Kab. Karangasem              | 0                    |
| 394 | Kab. Klungkung               | 0                    |
| 395 | Kab. Tabanan                 | 0                    |
| 396 | Kota Denpasar                | 0                    |
| 397 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 150.000              |
| 398 | Kab. Bima                    | 0                    |
| 399 | Kab. Dompu                   | 0                    |
| 400 | Kab. Lombok Barat            | 0                    |
| 401 | Kab. Lombok Tengah           | 4.726.230            |
| 402 | Kab. Lombok Timur            | 0                    |
| 403 | Kab. Sumbawa                 | 7.183.830            |
| 404 | Kota Mataram                 | 0                    |
| 405 | Kota Bima                    | 0                    |
| 406 | Kab. Sumbawa Barat           | 0                    |
| 407 | Kab. Lombok Utara            | 0                    |
| 408 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 150.000              |
| 409 | Kab. Alor                    | 0                    |
| 410 | Kab. Belu                    | 2.332.800            |
| 411 | Kab. Ende                    | 0                    |
| 412 | Kab. Flores Timur            | 0                    |
| 413 | Kab. Kupang                  | 0                    |
| 414 | Kab. Lembata                 | 0                    |
| 415 | Kab. Manggarai               | 0                    |
| 416 | Kab. Ngada                   | 0                    |
| 417 | Kab. Sikka                   | 0                    |
| 418 | Kab. Sumba Barat             | 0                    |
| 419 | Kab. Sumba Timur             | 0                    |
| 420 | Kab. Timor Tengah Selatan    | 7.396.000            |
| 421 | Kab. Timor Tengah Utara      | 0                    |
| 422 | Kota Kupang                  | 0                    |
| 423 | Kab. Rote Ndao               | 0                    |
| 424 | Kab. Manggarai Barat         | 0                    |
| 425 | Kab. Nagekeo                 | 0                    |
| 426 | Kab. Sumba Barat Daya        | 0                    |
| 427 | Kab. Sumba Tengah            | 2.168.715            |
| 428 | Kab. Manggarai Timur         | 0                    |
| 429 | Kab. Sabu Raijua             | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH              | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 430 | Kab. Malaka              | 0                    |
| 431 | Provinsi Maluku          | 0                    |
| 432 | Kab. Kepulauan Tanimbar  | 0                    |
| 433 | Kab. Maluku Tengah       | 0                    |
| 434 | Kab. Maluku Tenggara     | 0                    |
| 435 | Kab. Buru                | 0                    |
| 436 | Kota Ambon               | 0                    |
| 437 | Kab. Seram Bagian Barat  | 0                    |
| 438 | Kab. Seram Bagian Timur  | 0                    |
| 439 | Kab. Kepulauan Aru       | 0                    |
| 440 | Kota Tual                | 0                    |
| 441 | Kab. Maluku Barat Daya   | 0                    |
| 442 | Kab. Buru Selatan        | 0                    |
| 443 | Provinsi Papua           | 150.000              |
| 444 | Kab. Biak Numfor         | 0                    |
| 445 | Kab. Jayapura            | 0                    |
| 446 | Kab. Kepulauan Yapen     | 0                    |
| 447 | Kota Jayapura            | 0                    |
| 448 | Kab. Sarmi               | 0                    |
| 449 | Kab. Keerom              | 2.340.800            |
| 450 | Kab. Waropen             | 0                    |
| 451 | Kab. Supiori             | 0                    |
| 452 | Kab. Mamberamo Raya      | 0                    |
| 453 | Provinsi Maluku Utara    | 0                    |
| 454 | Kab. Halmahera Tengah    | 0                    |
| 455 | Kota Ternate             | 0                    |
| 456 | Kab. Halmahera Barat     | 0                    |
| 457 | Kab. Halmahera Timur     | 0                    |
| 458 | Kab. Halmahera Selatan   | 0                    |
| 459 | Kab. Halmahera Utara     | 0                    |
| 460 | Kab. Kepulauan Sula      | 0                    |
| 461 | Kota Tidore Kepulauan    | 0                    |
| 462 | Kab. Pulau Morotai       | 0                    |
| 463 | Kab. Pulau Taliabu       | 0                    |
| 464 | Provinsi Banten          | 0                    |
| 465 | Kab. Lebak               | 0                    |
| 466 | Kab. Pandeglang          | 0                    |
| 467 | Kab. Serang              | 0                    |
| 468 | Kab. Tangerang           | 0                    |
| 469 | Kota Cilegon             | 0                    |
| 470 | Kota Tangerang           | 0                    |
| 471 | Kota Serang              | 0                    |
| 472 | Kota Tangerang Selatan   | 0                    |
| 473 | Provinsi Bangka Belitung | 0                    |
| 474 | Kab. Bangka              | 0                    |
| 475 | Kab. Belitung            | 0                    |
| 476 | Kota Pangkal Pinang      | 0                    |
| 477 | Kab. Bangka Selatan      | 0                    |
| 478 | Kab. Bangka Tengah       | 0                    |
| 479 | Kab. Bangka Barat        | 0                    |
| 480 | Kab. Belitung Timur      | 0                    |
| 481 | Provinsi Gorontalo       | 0                    |
| 482 | Kab. Boalemo             | 0                    |
| 483 | Kab. Gorontalo           | 0                    |
| 484 | Kota Gorontalo           | 0                    |
| 485 | Kab. Pohuwato            | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH               | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 486 | Kab. Bone Bolango         | 0                    |
| 487 | Kab. Gorontalo Utara      | 0                    |
| 488 | Provinsi Kepulauan Riau   | 0                    |
| 489 | Kab. Natuna               | 0                    |
| 490 | Kab. Kepulauan Anambas    | 0                    |
| 491 | Kab. Karimun              | 0                    |
| 492 | Kota Batam                | 0                    |
| 493 | Kota Tanjung Pinang       | 0                    |
| 494 | Kab. Lingga               | 0                    |
| 495 | Kab. Bintan               | 0                    |
| 496 | Provinsi Papua Barat      | 0                    |
| 497 | Kab. Fak Fak              | 0                    |
| 498 | Kab. Manokwari            | 0                    |
| 499 | Kab. Teluk Bintuni        | 0                    |
| 500 | Kab. Teluk Wondama        | 0                    |
| 501 | Kab. Kaimana              | 0                    |
| 502 | Kab. Manokwari Selatan    | 0                    |
| 503 | Kab. Pegunungan Arfak     | 0                    |
| 504 | Provinsi Sulawesi Barat   | 0                    |
| 505 | Kab. Majene               | 0                    |
| 506 | Kab. Mamuju               | 0                    |
| 507 | Kab. Polewali Mandar      | 0                    |
| 508 | Kab. Mamasa               | 0                    |
| 509 | Kab. Pasangkayu           | 0                    |
| 510 | Kab. Mamuju Tengah        | 0                    |
| 511 | Provinsi Kalimantan Utara | 0                    |
| 512 | Kab. Bulungan             | 0                    |
| 513 | Kab. Malinau              | 0                    |
| 514 | Kab. Nunukan              | 0                    |
| 515 | Kota Tarakan              | 0                    |
| 516 | Kab. Tana Tidung          | 0                    |
| 517 | Provinsi Papua Selatan    | 0                    |
| 518 | Kab. Merauke              | 2.658.425            |
| 519 | Kab. Boven Digoel         | 0                    |
| 520 | Kab. Mappi                | 0                    |
| 521 | Kab. Asmat                | 0                    |
| 522 | Provinsi Papua Tengah     | 0                    |
| 523 | Kab. Mimika               | 0                    |
| 524 | Kab. Nabire               | 0                    |
| 525 | Kab. Paniai               | 0                    |
| 526 | Kab. Puncak Jaya          | 0                    |
| 527 | Kab. Dogiyai              | 0                    |
| 528 | Kab. Puncak               | 0                    |
| 529 | Kab. Intan Jaya           | 0                    |
| 530 | Kab. Deiyai               | 0                    |
| 531 | Provinsi Papua Pegunungan | 0                    |
| 532 | Kab. Jayawijaya           | 0                    |
| 533 | Kab. Yahukimo             | 0                    |
| 534 | Kab. Pegunungan Bintang   | 0                    |
| 535 | Kab. Tolikara             | 0                    |
| 536 | Kab. Mamberamo Tengah     | 0                    |
| 537 | Kab. Yalimo               | 0                    |
| 538 | Kab. Lanny Jaya           | 0                    |
| 539 | Kab. Nduga                | 0                    |
| 540 | Provinsi Papua Barat Daya | 0                    |
| 541 | Kab. Sorong               | 0                    |

| NO  | NAMA DAERAH         | PAGU ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------|----------------------|
| 542 | Kota Sorong         | 0                    |
| 543 | Kab. Raja Ampat     | 0                    |
| 544 | Kab. Sorong Selatan | 0                    |
| 545 | Kab. Maybrat        | 0                    |
| 546 | Kab. Tambrauw       | 0                    |
|     | <b>NASIONAL</b>     | <b>211.650.000</b>   |

B. Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian

| NO | NAMA DAERAH             | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Provinsi Aceh           | 36.480                  |
| 2  | Kab. Aceh Barat         | 1.447.824               |
| 3  | Kab. Aceh Besar         | 873.624                 |
| 4  | Kab. Aceh Selatan       | 907.008                 |
| 5  | Kab. Aceh Singkil       | 319.200                 |
| 6  | Kab. Aceh Tengah        | 596.970                 |
| 7  | Kab. Aceh Tenggara      | 897.318                 |
| 8  | Kab. Aceh Timur         | 868.452                 |
| 9  | Kab. Aceh Utara         | 827.370                 |
| 10 | Kab. Bireuen            | 826.386                 |
| 11 | Kab. Pidie              | 1.123.380               |
| 12 | Kab. Simeulue           | 503.310                 |
| 13 | Kota Banda Aceh         | 201.666                 |
| 14 | Kota Sabang             | 82.080                  |
| 15 | Kota Langsa             | 170.226                 |
| 16 | Kota Lhokseumawe        | 59.280                  |
| 17 | Kab. Gayo Lues          | 627.342                 |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya    | 459.078                 |
| 19 | Kab. Aceh Jaya          | 333.906                 |
| 20 | Kab. Nagan Raya         | 361.266                 |
| 21 | Kab. Aceh Tamiang       | 383.040                 |
| 22 | Kab. Bener Meriah       | 397.746                 |
| 23 | Kab. Pidie Jaya         | 599.394                 |
| 24 | Kota Subulussalam       | 72.960                  |
| 25 | Provinsi Sumatera Utara | 36.480                  |
| 26 | Kab. Asahan             | 524.358                 |
| 27 | Kab. Dairi              | 401.280                 |
| 28 | Kab. Deli Serdang       | 498.066                 |
| 29 | Kab. Karo               | 449.412                 |
| 30 | Kab. Labuhanbatu        | 264.480                 |
| 31 | Kab. Langkat            | 557.346                 |
| 32 | Kab. Mandailing Natal   | 473.784                 |
| 33 | Kab. Nias               | 341.610                 |
| 34 | Kab. Simalungun         | 961.794                 |
| 35 | Kab. Tapanuli Selatan   | 886.194                 |
| 36 | Kab. Tapanuli Tengah    | 308.598                 |
| 37 | Kab. Tapanuli Utara     | 647.520                 |
| 38 | Kab. Toba               | 177.840                 |
| 39 | Kota Binjai             | 136.800                 |

| NO | NAMA DAERAH              | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 40 | Kota Medan               | 127.680                 |
| 41 | Kota Pematang Siantar    | 91.200                  |
| 42 | Kota Sibolga             | 4.560                   |
| 43 | Kota Tanjung Balai       | 27.360                  |
| 44 | Kota Tebing Tinggi       | 45.600                  |
| 45 | Kota Padangsidempuan     | 200.640                 |
| 46 | Kab. Pakpak Bharat       | 223.440                 |
| 47 | Kab. Nias Selatan        | 311.220                 |
| 48 | Kab. Humbang Hasundutan  | 114.000                 |
| 49 | Kab. Serdang Bedagai     | 515.280                 |
| 50 | Kab. Samosir             | 237.120                 |
| 51 | Kab. Batu Bara           | 751.446                 |
| 52 | Kab. Padang Lawas        | 742.236                 |
| 53 | Kab. Padang Lawas Utara  | 970.032                 |
| 54 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 137.826                 |
| 55 | Kab. Labuhanbatu Utara   | 275.106                 |
| 56 | Kab. Nias Utara          | 354.336                 |
| 57 | Kab. Nias Barat          | 213.474                 |
| 58 | Kota Gunungsitoli        | 118.560                 |
| 59 | Provinsi Sumatera Barat  | 59.280                  |
| 60 | Kab. Lima Puluh Kota     | 584.706                 |
| 61 | Kab. Agam                | 351.120                 |
| 62 | Kab. Kepulauan Mentawai  | 168.720                 |
| 63 | Kab. Padang Pariaman     | 291.840                 |
| 64 | Kab. Pasaman             | 296.400                 |
| 65 | Kab. Pesisir Selatan     | 378.480                 |
| 66 | Kab. Sijunjung           | 242.706                 |
| 67 | Kab. Solok               | 209.760                 |
| 68 | Kab. Tanah Datar         | 342.000                 |
| 69 | Kota Bukittinggi         | 41.040                  |
| 70 | Kota Padang Panjang      | 59.280                  |
| 71 | Kota Padang              | 145.920                 |
| 72 | Kota Payakumbuh          | 186.960                 |
| 73 | Kota Sawahlunto          | 136.800                 |
| 74 | Kota Solok               | 159.600                 |
| 75 | Kota Pariaman            | 155.040                 |
| 76 | Kab. Pasaman Barat       | 273.600                 |
| 77 | Kab. Dharmasraya         | 269.040                 |
| 78 | Kab. Solok Selatan       | 259.920                 |
| 79 | Provinsi Riau            | 41.040                  |
| 80 | Kab. Bengkalis           | 305.520                 |
| 81 | Kab. Indragiri Hilir     | 251.826                 |
| 82 | Kab. Indragiri Hulu      | 275.106                 |
| 83 | Kab. Kampar              | 508.212                 |
| 84 | Kab. Kuantan Singingi    | 517.812                 |
| 85 | Kab. Pelalawan           | 391.770                 |
| 86 | Kab. Rokan Hilir         | 301.986                 |
| 87 | Kab. Rokan Hulu          | 465.120                 |

| NO  | NAMA DAERAH                     | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 88  | Kab. Siak                       | 369.360                 |
| 89  | Kota Dumai                      | 109.440                 |
| 90  | Kota Pekanbaru                  | 114.000                 |
| 91  | Kab. Kepulauan Meranti          | 77.520                  |
| 92  | Provinsi Jambi                  | 104.880                 |
| 93  | Kab. Batanghari                 | 559.968                 |
| 94  | Kab. Bungo                      | 634.806                 |
| 95  | Kab. Kerinci                    | 1.603.794               |
| 96  | Kab. Merangin                   | 925.866                 |
| 97  | Kab. Muaro Jambi                | 470.208                 |
| 98  | Kab. Sarolangun                 | 555.822                 |
| 99  | Kab. Tanjung Jabung Barat       | 196.080                 |
| 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur       | 110.466                 |
| 101 | Kab. Tebo                       | 498.726                 |
| 102 | Kota Jambi                      | 325.728                 |
| 103 | Kota Sungai Penuh               | 594.858                 |
| 104 | Provinsi Sumatera Selatan       | 259.920                 |
| 105 | Kab. Lahat                      | 1.227.510               |
| 106 | Kab. Musi Banyuasin             | 437.760                 |
| 107 | Kab. Musi Rawas                 | 539.106                 |
| 108 | Kab. Muara Enim                 | 556.320                 |
| 109 | Kab. Ogan Komering Ilir         | 524.400                 |
| 110 | Kab. Ogan Komering Ulu          | 288.306                 |
| 111 | Kota Palembang                  | 177.840                 |
| 112 | Kota Prabumulih                 | 159.600                 |
| 113 | Kota Pagar Alam                 | 292.824                 |
| 114 | Kota Lubuk Linggau              | 323.370                 |
| 115 | Kab. Banyuasin                  | 734.160                 |
| 116 | Kab. Ogan Ilir                  | 516.306                 |
| 117 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur    | 364.800                 |
| 118 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  | 347.586                 |
| 119 | Kab. Empat Lawang               | 196.080                 |
| 120 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 223.440                 |
| 121 | Kab. Musi Rawas Utara           | 36.480                  |
| 122 | Provinsi Bengkulu               | 155.040                 |
| 123 | Kab. Bengkulu Selatan           | 487.920                 |
| 124 | Kab. Bengkulu Utara             | 787.998                 |
| 125 | Kab. Rejang Lebong              | 334.476                 |
| 126 | Kota Bengkulu                   | 132.240                 |
| 127 | Kab. Kaur                       | 1.096.056               |
| 128 | Kab. Seluma                     | 799.146                 |
| 129 | Kab. Mukomuko                   | 351.120                 |
| 130 | Kab. Lebong                     | 255.384                 |
| 131 | Kab. Kepahiang                  | 319.200                 |
| 132 | Kab. Bengkulu Tengah            | 388.608                 |
| 133 | Provinsi Lampung                | 177.840                 |
| 134 | Kab. Lampung Barat              | 323.760                 |
| 135 | Kab. Lampung Selatan            | 736.764                 |

| NO  | NAMA DAERAH              | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 136 | Kab. Lampung Tengah      | 1.112.640               |
| 137 | Kab. Lampung Utara       | 852.720                 |
| 138 | Kab. Lampung Timur       | 425.106                 |
| 139 | Kab. Tanggamus           | 466.146                 |
| 140 | Kab. Tulang Bawang       | 241.680                 |
| 141 | Kab. Way Kanan           | 406.866                 |
| 142 | Kota Bandar Lampung      | 127.680                 |
| 143 | Kota Metro               | 118.560                 |
| 144 | Kab. Pesawaran           | 332.880                 |
| 145 | Kab. Pringsewu           | 259.920                 |
| 146 | Kab. Mesuji              | 127.680                 |
| 147 | Kab. Tulang Bawang Barat | 668.022                 |
| 148 | Kab. Pesisir Barat       | 127.680                 |
| 149 | Provinsi DKI Jakarta     | 467.658                 |
| 150 | Provinsi Jawa Barat      | 493.020                 |
| 151 | Kab. Bandung             | 548.706                 |
| 152 | Kab. Bekasi              | 382.062                 |
| 153 | Kab. Bogor               | 714.372                 |
| 154 | Kab. Ciamis              | 586.692                 |
| 155 | Kab. Cianjur             | 651.558                 |
| 156 | Kab. Cirebon             | 915.012                 |
| 157 | Kab. Garut               | 832.932                 |
| 158 | Kab. Indramayu           | 661.200                 |
| 159 | Kab. Karawang            | 1.113.696               |
| 160 | Kab. Kuningan            | 832.932                 |
| 161 | Kab. Majalengka          | 1.398.372               |
| 162 | Kab. Purwakarta          | 512.820                 |
| 163 | Kab. Subang              | 790.542                 |
| 164 | Kab. Sukabumi            | 724.518                 |
| 165 | Kab. Sumedang            | 609.492                 |
| 166 | Kab. Tasikmalaya         | 1.029.012               |
| 167 | Kota Bandung             | 95.760                  |
| 168 | Kota Bekasi              | 22.800                  |
| 169 | Kota Bogor               | 86.640                  |
| 170 | Kota Cirebon             | 31.920                  |
| 171 | Kota Depok               | 63.840                  |
| 172 | Kota Sukabumi            | 86.640                  |
| 173 | Kota Tasikmalaya         | 259.920                 |
| 174 | Kota Cimahi              | 36.480                  |
| 175 | Kota Banjar              | 100.320                 |
| 176 | Kab. Bandung Barat       | 355.680                 |
| 177 | Kab. Pangandaran         | 205.200                 |
| 178 | Provinsi Jawa Tengah     | 86.640                  |
| 179 | Kab. Banjarnegara        | 456.000                 |
| 180 | Kab. Banyumas            | 528.960                 |
| 181 | Kab. Batang              | 383.040                 |
| 182 | Kab. Blora               | 502.626                 |
| 183 | Kab. Boyolali            | 588.240                 |

| NO  | NAMA DAERAH            | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 184 | Kab. Brebes            | 579.120                 |
| 185 | Kab. Cilacap           | 597.360                 |
| 186 | Kab. Demak             | 396.720                 |
| 187 | Kab. Grobogan          | 538.080                 |
| 188 | Kab. Jepara            | 296.400                 |
| 189 | Kab. Karanganyar       | 433.200                 |
| 190 | Kab. Kebumen           | 583.680                 |
| 191 | Kab. Kendal            | 478.800                 |
| 192 | Kab. Klaten            | 702.240                 |
| 193 | Kab. Kudus             | 205.200                 |
| 194 | Kab. Magelang          | 720.480                 |
| 195 | Kab. Pati              | 570.000                 |
| 196 | Kab. Pekalongan        | 396.720                 |
| 197 | Kab. Pemasang          | 310.080                 |
| 198 | Kab. Purbalingga       | 697.680                 |
| 199 | Kab. Purworejo         | 1.248.414               |
| 200 | Kab. Rembang           | 369.360                 |
| 201 | Kab. Semarang          | 538.080                 |
| 202 | Kab. Sragen            | 497.040                 |
| 203 | Kab. Sukoharjo         | 411.426                 |
| 204 | Kab. Tegal             | 442.320                 |
| 205 | Kab. Temanggung        | 647.520                 |
| 206 | Kab. Wonogiri          | 478.800                 |
| 207 | Kab. Wonosobo          | 528.960                 |
| 208 | Kota Magelang          | 22.800                  |
| 209 | Kota Pekalongan        | 36.480                  |
| 210 | Kota Salatiga          | 50.160                  |
| 211 | Kota Semarang          | 114.000                 |
| 212 | Kota Surakarta         | 27.360                  |
| 213 | Kota Tegal             | 59.280                  |
| 214 | Provinsi DI Yogyakarta | 45.600                  |
| 215 | Kab. Bantul            | 378.480                 |
| 216 | Kab. Gunung Kidul      | 446.880                 |
| 217 | Kab. Kulon Progo       | 360.240                 |
| 218 | Kab. Sleman            | 346.560                 |
| 219 | Kota Yogyakarta        | 63.840                  |
| 220 | Provinsi Jawa Timur    | 109.440                 |
| 221 | Kab. Bangkalan         | 315.666                 |
| 222 | Kab. Banyuwangi        | 420.546                 |
| 223 | Kab. Blitar            | 688.560                 |
| 224 | Kab. Bojonegoro        | 908.424                 |
| 225 | Kab. Bondowoso         | 679.440                 |
| 226 | Kab. Gresik            | 241.680                 |
| 227 | Kab. Jember            | 766.080                 |
| 228 | Kab. Jombang           | 556.320                 |
| 229 | Kab. Kediri            | 720.480                 |
| 230 | Kab. Lamongan          | 775.158                 |
| 231 | Kab. Lumajang          | 538.080                 |

| NO  | NAMA DAERAH                | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| 232 | Kab. Madiun                | 433.200                 |
| 233 | Kab. Magetan               | 452.466                 |
| 234 | Kab. Malang                | 820.800                 |
| 235 | Kab. Mojokerto             | 598.866                 |
| 236 | Kab. Nganjuk               | 688.560                 |
| 237 | Kab. Ngawi                 | 557.346                 |
| 238 | Kab. Pacitan               | 378.546                 |
| 239 | Kab. Pamekasan             | 471.732                 |
| 240 | Kab. Pasuruan              | 533.520                 |
| 241 | Kab. Ponorogo              | 779.760                 |
| 242 | Kab. Probolinggo           | 483.360                 |
| 243 | Kab. Sampang               | 337.440                 |
| 244 | Kab. Sidoarjo              | 360.240                 |
| 245 | Kab. Situbondo             | 274.626                 |
| 246 | Kab. Sumenep               | 653.106                 |
| 247 | Kab. Trenggalek            | 607.506                 |
| 248 | Kab. Tuban                 | 454.518                 |
| 249 | Kab. Tulungagung           | 579.120                 |
| 250 | Kota Blitar                | 72.960                  |
| 251 | Kota Kediri                | 91.200                  |
| 252 | Kota Madiun                | 0                       |
| 253 | Kota Malang                | 114.000                 |
| 254 | Kota Mojokerto             | 136.758                 |
| 255 | Kota Pasuruan              | 91.200                  |
| 256 | Kota Probolinggo           | 54.720                  |
| 257 | Kota Surabaya              | 227.436                 |
| 258 | Kota Batu                  | 109.440                 |
| 259 | Provinsi Kalimantan Barat  | 96.900                  |
| 260 | Kab. Bengkayang            | 644.100                 |
| 261 | Kab. Landak                | 786.600                 |
| 262 | Kab. Kapuas Hulu           | 647.406                 |
| 263 | Kab. Ketapang              | 611.106                 |
| 264 | Kab. Mempawah              | 273.600                 |
| 265 | Kab. Sambas                | 564.300                 |
| 266 | Kab. Sanggau               | 615.600                 |
| 267 | Kab. Sintang               | 484.500                 |
| 268 | Kota Pontianak             | 68.400                  |
| 269 | Kota Singkawang            | 125.400                 |
| 270 | Kab. Sekadau               | 313.500                 |
| 271 | Kab. Melawi                | 364.230                 |
| 272 | Kab. Kayong Utara          | 245.100                 |
| 273 | Kab. Kubu Raya             | 330.600                 |
| 274 | Provinsi Kalimantan Tengah | 57.000                  |
| 275 | Kab. Barito Selatan        | 392.412                 |
| 276 | Kab. Barito Utara          | 491.406                 |
| 277 | Kab. Kapuas                | 661.200                 |
| 278 | Kab. Kotawaringin Barat    | 413.706                 |
| 279 | Kab. Kotawaringin Timur    | 546.630                 |

| NO  | NAMA DAERAH                           | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| 280 | Kota Palangkaraya                     | 123.006                 |
| 281 | Kab. Katingan                         | 364.800                 |
| 282 | Kab. Seruyan                          | 159.600                 |
| 283 | Kab. Sukamara                         | 125.400                 |
| 284 | Kab. Lamandau                         | 165.300                 |
| 285 | Kab. Gunung Mas                       | 256.500                 |
| 286 | Kab. Pulang Pisau                     | 353.400                 |
| 287 | Kab. Murung Raya                      | 197.106                 |
| 288 | Kab. Barito Timur                     | 518.700                 |
| 289 | Provinsi Kalimantan Selatan           | 285.000                 |
| 290 | Kab. Banjar                           | 1.080.606               |
| 291 | Kab. Barito Kuala                     | 581.400                 |
| 292 | Kab. Hulu Sungai Selatan              | 461.700                 |
| 293 | Kab. Hulu Sungai Tengah               | 616.512                 |
| 294 | Kab. Hulu Sungai Utara                | 513.000                 |
| 295 | Kab. Kotabaru                         | 357.324                 |
| 296 | Kab. Tabalong                         | 427.500                 |
| 297 | Kab. Tanah Laut                       | 484.500                 |
| 298 | Kab. Tapin                            | 453.606                 |
| 299 | Kota Banjarbaru                       | 182.400                 |
| 300 | Kota Banjarmasin                      | 160.512                 |
| 301 | Kab. Balangan                         | 381.900                 |
| 302 | Kab. Tanah Bumbu                      | 461.700                 |
| 303 | Provinsi Kalimantan Timur             | 11.400                  |
| 304 | Kab. Berau                            | 256.500                 |
| 305 | Kab. Kutai Kartanegara                | 780.900                 |
| 306 | Kab. Kutai Barat                      | 513.912                 |
| 307 | Kab. Kutai Timur                      | 1.051.218               |
| 308 | Kab. Paser                            | 478.800                 |
| 309 | Kota Balikpapan                       | 68.400                  |
| 310 | Kota Bontang                          | 34.200                  |
| 311 | Kota Samarinda                        | 148.200                 |
| 312 | Kab. Penajam Paser Utara              | 342.000                 |
| 313 | Kab. Mahakam Ulu                      | 62.700                  |
| 314 | Provinsi Sulawesi Utara               | 353.400                 |
| 315 | Kab. Bolaang Mongondow                | 502.512                 |
| 316 | Kab. Minahasa                         | 467.400                 |
| 317 | Kab. Kepulauan Sangihe                | 222.300                 |
| 318 | Kota Bitung                           | 125.400                 |
| 319 | Kota Manado                           | 142.500                 |
| 320 | Kab. Kepulauan Talaud                 | 357.642                 |
| 321 | Kab. Minahasa Selatan                 | 427.500                 |
| 322 | Kota Tomohon                          | 267.900                 |
| 323 | Kab. Minahasa Utara                   | 333.906                 |
| 324 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 57.000                  |
| 325 | Kota Kotamobagu                       | 136.800                 |
| 326 | Kab. Bolaang Mongondow Utara          | 453.606                 |
| 327 | Kab. Minahasa Tenggara                | 178.206                 |

| NO  | NAMA DAERAH                    | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 328 | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | 256.500                 |
| 329 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 239.400                 |
| 330 | Provinsi Sulawesi Tengah       | 193.800                 |
| 331 | Kab. Banggai                   | 1.089.636               |
| 332 | Kab. Banggai Kepulauan         | 368.106                 |
| 333 | Kab. Buol                      | 352.512                 |
| 334 | Kab. Toli-Toli                 | 699.348                 |
| 335 | Kab. Donggala                  | 581.400                 |
| 336 | Kab. Morowali                  | 393.300                 |
| 337 | Kab. Poso                      | 1.032.366               |
| 338 | Kota Palu                      | 233.700                 |
| 339 | Kab. Parigi Moutong            | 900.402                 |
| 340 | Kab. Tojo Una-Una              | 548.730                 |
| 341 | Kab. Sigi                      | 1.137.606               |
| 342 | Kab. Banggai Laut              | 216.600                 |
| 343 | Kab. Morowali Utara            | 570.000                 |
| 344 | Provinsi Sulawesi Selatan      | 176.700                 |
| 345 | Kab. Bantaeng                  | 319.200                 |
| 346 | Kab. Barru                     | 366.306                 |
| 347 | Kab. Bone                      | 1.025.136               |
| 348 | Kab. Bulukumba                 | 2.040.948               |
| 349 | Kab. Enrekang                  | 1.036.902               |
| 350 | Kab. Gowa                      | 1.215.450               |
| 351 | Kab. Jeneponto                 | 613.206                 |
| 352 | Kab. Luwu                      | 799.506                 |
| 353 | Kab. Luwu Utara                | 758.100                 |
| 354 | Kab. Maros                     | 719.706                 |
| 355 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan  | 563.730                 |
| 356 | Kota Palopo                    | 313.500                 |
| 357 | Kab. Luwu Timur                | 805.206                 |
| 358 | Kab. Pinrang                   | 544.236                 |
| 359 | Kab. Sinjai                    | 614.418                 |
| 360 | Kab. Kepulauan Selayar         | 550.506                 |
| 361 | Kab. Sidenreng Rappang         | 598.500                 |
| 362 | Kab. Soppeng                   | 533.406                 |
| 363 | Kab. Takalar                   | 1.518.942               |
| 364 | Kab. Tana Toraja               | 465.006                 |
| 365 | Kab. Wajo                      | 714.006                 |
| 366 | Kota Parepare                  | 149.706                 |
| 367 | Kota Makassar                  | 313.500                 |
| 368 | Kab. Toraja Utara              | 205.200                 |
| 369 | Provinsi Sulawesi Tenggara     | 592.800                 |
| 370 | Kab. Buton                     | 176.700                 |
| 371 | Kab. Konawe                    | 771.054                 |
| 372 | Kab. Kolaka                    | 444.600                 |
| 373 | Kab. Muna                      | 757.212                 |
| 374 | Kota Kendari                   | 327.612                 |
| 375 | Kota Baubau                    | 115.506                 |

| NO  | NAMA DAERAH                  | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 376 | Kab. Konawe Selatan          | 1.076.826               |
| 377 | Kab. Bombana                 | 374.424                 |
| 378 | Kab. Wakatobi                | 189.630                 |
| 379 | Kab. Kolaka Utara            | 353.742                 |
| 380 | Kab. Konawe Utara            | 176.700                 |
| 381 | Kab. Buton Utara             | 197.106                 |
| 382 | Kab. Konawe Kepulauan        | 22.800                  |
| 383 | Kab. Kolaka Timur            | 592.572                 |
| 384 | Kab. Muna Barat              | 410.400                 |
| 385 | Kab. Buton Tengah            | 127.518                 |
| 386 | Kab. Buton Selatan           | 150.324                 |
| 387 | Provinsi Bali                | 57.000                  |
| 388 | Kab. Badung                  | 250.800                 |
| 389 | Kab. Bangli                  | 507.300                 |
| 390 | Kab. Buleleng                | 421.800                 |
| 391 | Kab. Gianyar                 | 420.672                 |
| 392 | Kab. Jembrana                | 193.800                 |
| 393 | Kab. Karangasem              | 302.100                 |
| 394 | Kab. Klungkung               | 205.200                 |
| 395 | Kab. Tabanan                 | 222.300                 |
| 396 | Kota Denpasar                | 91.200                  |
| 397 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 119.700                 |
| 398 | Kab. Bima                    | 1.290.024               |
| 399 | Kab. Dompu                   | 649.800                 |
| 400 | Kab. Lombok Barat            | 746.700                 |
| 401 | Kab. Lombok Tengah           | 909.606                 |
| 402 | Kab. Lombok Timur            | 991.800                 |
| 403 | Kab. Sumbawa                 | 860.700                 |
| 404 | Kota Mataram                 | 199.500                 |
| 405 | Kota Bima                    | 288.306                 |
| 406 | Kab. Sumbawa Barat           | 302.100                 |
| 407 | Kab. Lombok Utara            | 245.100                 |
| 408 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 42.000                  |
| 409 | Kab. Alor                    | 588.000                 |
| 410 | Kab. Belu                    | 378.000                 |
| 411 | Kab. Ende                    | 858.000                 |
| 412 | Kab. Flores Timur            | 989.532                 |
| 413 | Kab. Kupang                  | 706.896                 |
| 414 | Kab. Lembata                 | 576.024                 |
| 415 | Kab. Manggarai               | 510.000                 |
| 416 | Kab. Ngada                   | 378.000                 |
| 417 | Kab. Sikka                   | 690.000                 |
| 418 | Kab. Sumba Barat             | 318.000                 |
| 419 | Kab. Sumba Timur             | 752.706                 |
| 420 | Kab. Timor Tengah Selatan    | 635.412                 |
| 421 | Kab. Timor Tengah Utara      | 720.000                 |
| 422 | Kota Kupang                  | 543.366                 |
| 423 | Kab. Rote Ndao               | 276.000                 |

| NO  | NAMA DAERAH             | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 424 | Kab. Manggarai Barat    | 617.412                 |
| 425 | Kab. Nagekeo            | 644.706                 |
| 426 | Kab. Sumba Barat Daya   | 617.412                 |
| 427 | Kab. Sumba Tengah       | 656.706                 |
| 428 | Kab. Manggarai Timur    | 587.130                 |
| 429 | Kab. Sabu Raijua        | 282.306                 |
| 430 | Kab. Malaka             | 539.412                 |
| 431 | Provinsi Maluku         | 174.000                 |
| 432 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 90.000                  |
| 433 | Kab. Maluku Tengah      | 1.442.004               |
| 434 | Kab. Maluku Tenggara    | 108.000                 |
| 435 | Kab. Buru               | 384.000                 |
| 436 | Kota Ambon              | 168.000                 |
| 437 | Kab. Seram Bagian Barat | 378.000                 |
| 438 | Kab. Seram Bagian Timur | 120.000                 |
| 439 | Kab. Kepulauan Aru      | 480.000                 |
| 440 | Kota Tual               | 96.000                  |
| 441 | Kab. Maluku Barat Daya  | 138.000                 |
| 442 | Kab. Buru Selatan       | 150.306                 |
| 443 | Provinsi Papua          | 0                       |
| 444 | Kab. Biak Numfor        | 667.554                 |
| 445 | Kab. Jayapura           | 534.966                 |
| 446 | Kab. Kepulauan Yapen    | 330.612                 |
| 447 | Kota Jayapura           | 66.000                  |
| 448 | Kab. Sarmi              | 96.000                  |
| 449 | Kab. Keerom             | 503.412                 |
| 450 | Kab. Waropen            | 312.000                 |
| 451 | Kab. Supiori            | 170.706                 |
| 452 | Kab. Mamberamo Raya     | 144.000                 |
| 453 | Provinsi Maluku Utara   | 96.000                  |
| 454 | Kab. Halmahera Tengah   | 161.412                 |
| 455 | Kota Ternate            | 314.706                 |
| 456 | Kab. Halmahera Barat    | 450.000                 |
| 457 | Kab. Halmahera Timur    | 293.412                 |
| 458 | Kab. Halmahera Selatan  | 401.436                 |
| 459 | Kab. Halmahera Utara    | 754.236                 |
| 460 | Kab. Kepulauan Sula     | 192.000                 |
| 461 | Kota Tidore Kepulauan   | 354.000                 |
| 462 | Kab. Pulau Morotai      | 203.412                 |
| 463 | Kab. Pulau Taliabu      | 50.706                  |
| 464 | Provinsi Banten         | 141.360                 |
| 465 | Kab. Lebak              | 676.386                 |
| 466 | Kab. Pandeglang         | 766.080                 |
| 467 | Kab. Serang             | 728.688                 |
| 468 | Kab. Tangerang          | 360.240                 |
| 469 | Kota Cilegon            | 63.840                  |
| 470 | Kota Tangerang          | 70.452                  |
| 471 | Kota Serang             | 209.262                 |

| NO  | NAMA DAERAH                        | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|------------------------------------|-------------------------|
| 472 | Kota Tangerang Selatan             | 27.360                  |
| 473 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 104.880                 |
| 474 | Kab. Bangka                        | 246.240                 |
| 475 | Kab. Belitung                      | 182.400                 |
| 476 | Kota Pangkal Pinang                | 54.720                  |
| 477 | Kab. Bangka Selatan                | 123.120                 |
| 478 | Kab. Bangka Tengah                 | 223.440                 |
| 479 | Kab. Bangka Barat                  | 291.840                 |
| 480 | Kab. Belitung Timur                | 164.160                 |
| 481 | Provinsi Gorontalo                 | 51.300                  |
| 482 | Kab. Boalemo                       | 459.330                 |
| 483 | Kab. Gorontalo                     | 834.318                 |
| 484 | Kota Gorontalo                     | 131.100                 |
| 485 | Kab. Pohuwato                      | 419.406                 |
| 486 | Kab. Bone Bolango                  | 658.806                 |
| 487 | Kab. Gorontalo Utara               | 421.800                 |
| 488 | Provinsi Kepulauan Riau            | 27.360                  |
| 489 | Kab. Natuna                        | 54.720                  |
| 490 | Kab. Kepulauan Anambas             | 22.800                  |
| 491 | Kab. Karimun                       | 142.386                 |
| 492 | Kota Batam                         | 31.920                  |
| 493 | Kota Tanjung Pinang                | 13.680                  |
| 494 | Kab. Lingga                        | 4.560                   |
| 495 | Kab. Bintan                        | 82.080                  |
| 496 | Provinsi Papua Barat               | 24.000                  |
| 497 | Kab. Fakfak                        | 258.000                 |
| 498 | Kab. Manokwari                     | 768.708                 |
| 499 | Kab. Teluk Bintuni                 | 312.000                 |
| 500 | Kab. Teluk Wondama                 | 348.000                 |
| 501 | Kab. Kaimana                       | 92.706                  |
| 502 | Kab. Manokwari Selatan             | 397.296                 |
| 503 | Kab. Pegunungan Arfak              | 101.412                 |
| 504 | Provinsi Sulawesi Barat            | 45.600                  |
| 505 | Kab. Majene                        | 483.018                 |
| 506 | Kab. Mamuju                        | 591.912                 |
| 507 | Kab. Polewali Mandar               | 715.806                 |
| 508 | Kab. Mamasa                        | 1.053.654               |
| 509 | Kab. Pasangkayu                    | 222.300                 |
| 510 | Kab. Mamuju Tengah                 | 149.112                 |
| 511 | Provinsi Kalimantan Utara          | 39.900                  |
| 512 | Kab. Bulungan                      | 318.312                 |
| 513 | Kab. Malinau                       | 272.118                 |
| 514 | Kab. Nunukan                       | 510.036                 |
| 515 | Kota Tarakan                       | 28.500                  |
| 516 | Kab. Tana Tidung                   | 62.700                  |
| 517 | Provinsi Papua Selatan             | 0                       |
| 518 | Kab. Merauke                       | 534.024                 |
| 519 | Kab. Boven Digoel                  | 360.024                 |

| NO  | NAMA DAERAH               | RINCIAN ALOKASI (Rp000) |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 520 | Kab. Mappi                | 138.000                 |
| 521 | Kab. Asmat                | 168.000                 |
| 522 | Provinsi Papua Tengah     | 0                       |
| 523 | Kab. Mimika               | 210.918                 |
| 524 | Kab. Nabire               | 276.000                 |
| 525 | Kab. Paniai               | 297.318                 |
| 526 | Kab. Puncak Jaya          | 0                       |
| 527 | Kab. Dogiyai              | 66.000                  |
| 528 | Kab. Puncak               | 0                       |
| 529 | Kab. Intan Jaya           | 0                       |
| 530 | Kab. Deiyai               | 86.118                  |
| 531 | Provinsi Papua Pegunungan | 0                       |
| 532 | Kab. Jayawijaya           | 692.520                 |
| 533 | Kab. Yahukimo             | 396.684                 |
| 534 | Kab. Pegunungan Bintang   | 192.000                 |
| 535 | Kab. Tolikara             | 0                       |
| 536 | Kab. Mamberamo Tengah     | 0                       |
| 537 | Kab. Yalimo               | 0                       |
| 538 | Kab. Lanny Jaya           | 26.706                  |
| 539 | Kab. Nduga                | 0                       |
| 540 | Provinsi Papua Barat Daya | 0                       |
| 541 | Kab. Sorong               | 360.000                 |
| 542 | Kota Sorong               | 129.012                 |
| 543 | Kab. Raja Ampat           | 42.000                  |
| 544 | Kab. Sorong Selatan       | 0                       |
| 545 | Kab. Maybrat              | 0                       |
| 546 | Kab. Tambrau              | 209.718                 |
|     | DANA CADANGAN             | 0                       |
|     | <b>NASIONAL</b>           | <b>216.329.010</b>      |

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 PROVINSI  
 SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

| NO   | KEGIATAN                              | PERENCANAAN KEGIATAN |        |           | PELAKSANAAN KEGIATAN  |        | Realisasi Penggunaan<br>(Rp) | Persentase Output<br>(%) |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---|--------|------------------------------|--------------------------|
|  |                                       | RPD (KRISNA)         |        | Pagu APBN | RPD FINAL (KRISNA)  |        |                              |                          |
|  |                                       | Jumlah               | Satuan | (Rp)      | Jumlah  | Satuan |                              |                          |
| A  | Operasional Pengujian Penyakit Hewan  |                      | Paket  |           |   | Paket  |                              |                          |
| 1  | Proses Akreditasi                     |                      | Paket  |           |   | Paket  |                              |                          |
| 2  | Bahan pengujian dan bahan habis pakai |                      | Paket  |           |   | Paket  |                              |                          |
| 3  | Operasional laboratorium              |                      | Paket  |           |   | Paket  |                              |                          |
| 4  | Surveilans tidak lanjut kasus         |                      | Paket  |           |   | Paket  |                              |                          |
|  | <b>Total</b>                          |                      |        |           |   |        |                              |                          |
| Pagu APBN:<br>Total Perencanaan KPP<br>SP2D Netto<br>Total Pelaksanaan KPP |                                       |                      |        |           | Tempat ....., Tanggal<br>Mengetahui,<br>Kepala OPD Teknis<br>... (tanda tangan dan stempel)<br>(.....)<br>NIP ..... |        |                              |                          |

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KAB/KOTA  
 SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

| NO   | KEGIATAN  | PERENCANAAN KEGIATAN |          |           | PELAKSANAAN KEGIATAN  |          | Realisasi Penggunaan<br>(Rp) | Persentase Output<br>(%) |
|--|---|----------------------|----------|-----------|---|----------|------------------------------|--------------------------|
|  |   | RPD (KRISNA)         |          | Pagu APBN | RPD FINAL (KRISNA)  |          |                              |                          |
|  |   | Jumlah               | Satuan   | (Rp)      | Jumlah  | Satuan   |                              |                          |
| B  | Biaya Operasional Puskesmas                                     |                      |          |           |   |          |                              |                          |
|  | a. Obat Hewan   |                      | Paket    |           |   | Paket    |                              |                          |
|  | b. Bahan Pendukung Pengobatan                                   |                      | Paket    |           |   | Paket    |                              |                          |
|  | c. Operasional Pelaporan iSIKHNAS                               |                      | OB       |           |   | OB       |                              |                          |
|  | d. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan                        |                      | Org Keg. |           |   | Org Keg. |                              |                          |
|  | e. Koordinasi   |                      | Org Keg. |           |   | Org Keg. |                              |                          |
|  | f. Surveilans   |                      | Org Keg. |           |   | Org Keg. |                              |                          |
|  | g. Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium |                      | Tahun    |           |   | Tahun    |                              |                          |
|  | h. Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan                     |                      | OP       |           |   | OP       |                              |                          |
|  | <b>TOTAL</b>  |                      |          |           |   |          |                              |                          |
| Pagu APBN:<br>Total Perencanaan KPP<br>SP2D Netto<br>Total Pelaksanaan KPP |   |                      |          |           | Tempat ....., Tanggal<br>Mengetahui,<br>Kepala OPD Teknis<br>... (tanda tangan dan stempel)<br>(.....)<br>NIP ..... |          |                              |                          |

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KAB/KOTA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**

| NO   | KEGIATAN                                      | PERENCANAAN KEGIATAN |        |   | PELAKSANAAN KEGIATAN |        | Realisasi Penggunaan<br>(Rp) | Persentase Output<br>(%) |
|--|---|----------------------|--------|---|----------------------|--------|------------------------------|--------------------------|
|  |   | RPD (KRISNA)         |        | Pagu APBN   | RPD FINAL (KRISNA)   |        |                              |                          |
|  |   | Jumlah               | Satuan | (Rp)  | Jumlah               | Satuan |                              |                          |
| <b>C</b>   | Layanan Penyuluh Pertanian                    |                      |        |   |                      |        |                              |                          |
| 1  | Layanan Operasional BPP                       |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | a. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja    |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | c. Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian    |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | d. Klinik Konsultasi Agribisnis               |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | e. Temu Usaha                                 |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
| 2  | SL Tematik                                    |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | a. Sosialisasi                                |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | b. Rembug Tani                                |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | c. Kursus Tani                                |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | d. Farm Field Day (FFD)                       |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | e. Pengawasan dan Pendampingan                |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
| 3  | Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S          |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | a. Perlengkapan Peserta                       |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | b. Konsumsi (3 bulan)                         |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | c. Dukungan administrasi                      |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | d. Perjalanan Peserta                         |                      | Paket  |   |                      | Paket  |                              |                          |
|  | <b>Total</b>                                  |                      |        |   |                      |        |                              |                          |
| Pagu APBN:<br>Total Perencanaan KPP<br>SP2D Netto<br>Total Pelaksanaan KPP |   |                      |        | Tempat ....., Tanggal<br>Mengetahui,<br>Kepala OPD Teknis<br>... (tanda tangan dan stempel)<br>(.....)<br>NIP ..... |                      |        |                              |                          |

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KAB/KOTA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**

| NO   | KEGIATAN  | PERENCANAAN KEGIATAN |        |   | PELAKSANAAN KEGIATAN |        | Realisasi Penggunaan<br>(Rp) | Persentase Output<br>(%) |
|--|---|----------------------|--------|---|----------------------|--------|------------------------------|--------------------------|
|  |   | RPD (KRISNA)         |        | Pagu APBN   | RPD FINAL (KRISNA)   |        |                              |                          |
|  |   | Jumlah               | Satuan | (Rp)  | Jumlah               | Satuan |                              |                          |
| <b>D</b>   | Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian                            |                      |        |   |                      |        |                              |                          |
| 1  | Insentif Penyuluhan Pertanian aparaturn sipil negara dan THL-TBPP |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | a. PNS (... Orang x ... Bulan)                                    |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | b. PPPK (... Orang x ... Bulan)                                   |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | c. THL-TBPP (... Orang x ... Bulan)                               |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
| 2  | Honorarium THL - TBPP   |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | a. SLTA (... OB x 1.200.000)                                      |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | b. DIII (... OB x 1.500.000)                                      |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | c. DIV/S1 (... OB x 2.000.000)                                    |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
| 3  | Iuran BPJS (... OB x 25.500)                                      |                      | OB     |   |                      | OB     |                              |                          |
|  | <b>Total</b>  |                      |        |   |                      |        |                              |                          |
| Pagu APBN:<br>Total Perencanaan KPP<br>SP2D Netto<br>Total Pelaksanaan KPP |   |                      |        | Tempat ....., Tanggal<br>Mengetahui,<br>Kepala OPD Teknis<br>... (tanda tangan dan stempel)<br>(.....)<br>NIP ..... |                      |        |                              |                          |

INDIKATOR KINERJA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI/KAB/KOTA....  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

| KEGIATAN                 |   | Capaian Indikator Kinerja  |        |                | Capaian Penerima Manfaat |                 |
|--------------------------|---|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|
|                          |   | Indikator  | Volume | Satuan Kinerja | Volume                   | Satuan Penerima |
| A                        | <i>Operasional Pengujian Penyakit Hewan</i>   |  |        |                |                          |                 |
|                          | 1   | Proses Akreditasi  |        |                |                          |                 |
|                          | 2   | Bahan pengujian dan bahan habis pakai                            |        |                |                          |                 |
|                          | 3   | Operasional laboratorium   |        |                |                          |                 |
|                          | 4   | Surveilans tidak lanjut kasus                                    |        |                |                          |                 |
| B                        | <i>Biaya Operasional Puskesmas</i>            |  |        |                |                          |                 |
|                          | 1   | Obat Hewan   |        |                |                          |                 |
|                          | 2   | Bahan Pendukung Pengobatan                                       |        |                |                          |                 |
|                          | 3   | Operasional Pelaporan iSIKHNAS                                   |        |                |                          |                 |
|                          | 4   | Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan                            |        |                |                          |                 |
|                          | 5   | Koordinasi   |        |                |                          |                 |
|                          | 6   | Surveilans   |        |                |                          |                 |
|                          | 7   | Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium     |        |                |                          |                 |
|                          | 8   | Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan                         |        |                |                          |                 |
| C                        | <i>Layanan Penyuluh Pertanian</i>             |  |        |                |                          |                 |
|                          | 1   | Layanan Operasional BPP  |        |                |                          |                 |
|                          |   | a. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi                    |        |                |                          |                 |
|                          |   | b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja                       |        |                |                          |                 |
|                          |   | c. Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian                       |        |                |                          |                 |
|                          |   | d. Klinik Konsultasi Agribisnis                                  |        |                |                          |                 |
|                          |   | e. Temu Usaha  |        |                |                          |                 |
|                          | 2   | SL Tematik   |        |                |                          |                 |
|                          |   | a. Sosialisasi   |        |                |                          |                 |
|                          |   | b. Rembug Tani   |        |                |                          |                 |
|                          |   | c. Kursus Tani   |        |                |                          |                 |
|                          |   | d. Farm Field Day (FFD)  |        |                |                          |                 |
|                          | 3   | Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S                             |        |                |                          |                 |
|                          |   | a. Perlengkapan Peserta  |        |                |                          |                 |
|                          |   | b. Konsumsi (3 bulan)  |        |                |                          |                 |
| c. Dukungan administrasi |   |  |        |                |                          |                 |
|                          |   | d. Perjalanan Peserta  |        |                |                          |                 |
| D                        | <i>Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian</i> |  |        |                |                          |                 |
|                          | 1   | Insentif Penyuluhan Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP |        |                |                          |                 |
|                          |   | a. PNS (... Orang x ... Bulan)                                   |        |                |                          |                 |
|                          |   | b. PPPK (... Orang x ... Bulan)                                  |        |                |                          |                 |

| KEGIATAN | Capaian Indikator Kinerja           |        |                | Capaian Penerima Manfaat |                 |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|-----------------|
|          | Indikator                           | Volume | Satuan Kinerja | Volume                   | Satuan Penerima |
|          | c. THL-TBPP (... Orang x ... Bulan) |        |                |                          |                 |
| 2        | Honorarium THL - TBPP               |        |                |                          |                 |
|          | a. SLTA (... OB x 1.200.000)        |        |                |                          |                 |
|          | b. DIII (... OB x 1.500.000)        |        |                |                          |                 |
|          | c. DIV/S1 (... OB x 2.000.000)      |        |                |                          |                 |
| 3        | Iuran BPJS (... OB x 25.500)        |        |                |                          |                 |

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN